

**ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA  
MODAL**

***THE ANALYSIS INFLUENCES OF LOCAL GOVERNMENT  
FINANCIAL MANAGEMENT ON CAPITAL EXPENDITURE  
ALLOCATION***

**AHMAD KAMIL  
8335118329**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**Program Studi S1 Akuntansi  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri  
Jakarta  
2016**

## **ABSTRAK**

Ahmad Kamil, 2016: Pengaruh Tingkat Kemandirian, Tingkat Pembiayaan SiLPA, dan Rasio Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal; Pembimbing: (1) Nuramalia Hasanah. S.E.,M.Ak ; (2) Ratna Anggraini, SE.Akt., M.Si,CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA, dan rasio ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA dan rasio ruang fiskal. Sedangkan variabel dependennya adalah belanja modal.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah dipublikasikan dan diaudit melalui BPK periode 2009-2013. Sampel yang digunakan sebanyak 28 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 8 kota dengan total observasi sebesar 130. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap belanja modal. Tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Rasio ruang fiskal berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA, dan rasio ruang fiskal berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal

**Kata kunci : tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA, rasio ruang fiskal, belanja modal.**

## **ABSTRACT**

*Ahmad Kamil, 2016: The Analysis Influences of Local Government Financial Management On Capital Expenditure Allocation. Advisors: (1) Nuramalia Hasanah. S.E.,M.Ak ; (2) Ratna Anggraini, SE.Akt., M.Si,CA.*

*The purpose of this research is to know the influence of regional income financing, SiLPA financing, and fiscal ratio toward capital expenditure.*

*The independent variables that used in this research are regional income financing, SiLPA financing, and fiscal ratio. While the dependent variable is capital expenditure.*

*This research used secondary data obtained from local government financial statements that have been published and audited by BPK in 2009-2013 period*

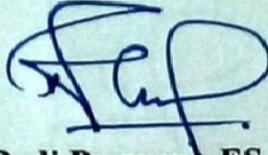
*Sample that used in this research is 28 regency/city that consist of 18 regencies and 8 cities and the whole observation are 130. The method used in this research is multiple linear regressions.*

*From the analysis t test showed that regional income financing has positive effect toward capital expenditure. SiLPA financing has positive effect toward capital expenditure. Fiscal ratio has positive effect toward capital expenditure. Analysis F test showed regional income financing, SiLPA financing, and fiscal ratio have significant effect capital expenditure.*

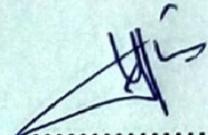
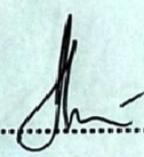
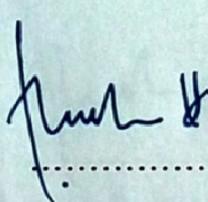
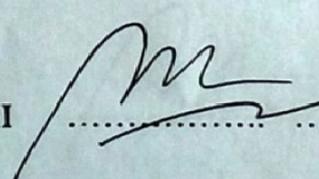
***Keyword: regional income financing, SiLPA financing, fiscal ratio, capital expenditure.***

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab  
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus  
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
<u>Yunika Murdayanati, SE., M.Si., M.Ak</u> NIP. 19780621 200801 2 001	Ketua Penguji	 .....	20 / 1 2016 .....
<u>Tri Hesti Utamingtyas, SE, M.SA</u> NIP. 19760107 200112 2 001	Sekretaris	 .....	19 / 1 2016 .....
<u>Tresno Eka Jaya, SE., M.Sc</u> NIP. 19741105 200604 1 001	Penguji Ahli	 .....	19 / 1 2016 .....
<u>Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Pembimbing I	 .....	20 / 1 2016 .....
<u>Ratna Anggarini, SE., Akt., M.Si., CA</u> NIP. 19740417 200012 2 001	Pembimbing II	 .....	20 / 1 2016 .....

Tanggal Lulus 14 Januari 2016

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun diperguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disertakan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya, sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Januari 2016

Yang membuat pernyataan,



Anmad Kamil  
Nomor Reg 8338118329

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa selalu tercurah kepada Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, Zat yang Maha Mulia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya yang tiada satupun makhluk di muka bumi ini diciptakan sia-sia dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan selalu kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW atas berkat rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Negeri Jakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan karunia, nikmat, dan pertolongan-Nya disaat susah maupun senang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberikan syafaat dan kecintaan kepada ummatnya hingga akhir zaman;
3. Bapak Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian;

4. Bapak Indra Pahala SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi FE UNJ dan Ibu Nuramalia Hasanah,SE.,M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ;
5. orang tua penulis, yang selalu mendukung dalam baik dalam spirit dan materill. Papa yang selalu memberikan ide, solusi dan menjadi inspirasi awal dalam pembuatan Skripsi ini.
6. Ibu Nuramalia Hasanah S.E, M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ratna Anggraini S.E,Akt.,M.Si.,CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga yang tidak terhitung nilainya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini, memberikan motivasi, masukan, semangat, kritik, dan pelajaran berharga dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas jasa-jasa dan tauladan yang sudah diberikan. Semoga Allah SWTmenjadikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang tidak putus-putusnya hingga akhir zaman kelak;
7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
8. Teman-teman seperjuangan

Penulis menyadari banyakya kekurangan yang ada dalam skripsi ini, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan

Jakarta, 11 Januari 2015

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK .....</b>	<b>10</b>
A. Deskripsi Konseptual .....	10
1. Belanja Modal .....	10
1.1 Pengertian Belanja Modal .....	10
1.2 Pendanaan Belanja Modal .....	13
2. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	13
2.1 Konsep <i>Value For Money</i> .....	16

2.2 Anggaran Berbasis Kinerja.....	18
2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
2.3.1 Tingkat Kemandirian.....	21
2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah .....	22
2.3.1.2 Pendapatan Transfer.....	24
2.3.1.3 Total Pendapatan.....	26
2.3.2 Tingkat Pembiayaan SiLPA.....	26
2.3.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).....	27
2.3.2.2 Total Belanja.....	29
2.3.3 Rasio Ruang Fiskal.....	30
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	32
C. Kerangka Teoritik .....	35
D. Perumusan Hipotesis Penelitian.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Tujuan Penelitian .....	39
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian .....	39
C. Metode Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	41
1. Variabel Terikat.....	41
2. Variabel Bebas .....	42
2.1 Tingkat Kemandirian.....	42
2.2 Tingkat Pembiayaan SiLPA.....	43

2.4 Rasio Ruang Fiskal.....	43
F. Teknik Analisa Data .....	44
1. Model Regresi Berganda .....	44
1.1 Uji Normalitas.....	45
1.2 uji Multikolinieritas .....	46
1.3 Uji Autokorelasi .....	47
1.4 Uji Heterokedastisitas.....	47
2. Uji Hipotesis.....	48
2.1 Koefisien Determinasi .....	49
2.2 Uji Simultan .....	50
2.3 Uji Statistik t .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Deskripsi Data .....	52
B. Pengujian Hipotesis.....	53
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	53
1.1 Belanja Modal .....	53
1.2 Tingkat Kemandirian .....	56
1.3 Tingkat Pembiayaan SiLPA.....	58
1.4 Rasio Ruang Fiskal.....	60
2. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	61
2.1 Uji Normalitas .....	62
2.2 Uji Multikolinieritas .....	63
2.3 Uji Heterokedastisitas.....	64
2.4 Uji Autokolerasi .....	65
3. Analisis Regresi Bergada.....	66

3.1 Uji Statistik t .....	68
3.2 uji Simultan .....	70
3.3 Uji Koefisien Determinasi .....	71
C. Pembahasan.....	72
1. Pengaruh Tingkat Kemandirian dengan Belanja Modal .....	72
2. Pengaruh Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Belanja Modal .....	75
3. Pengaruh Rasio Ruang Fiskal Terhadap Belanja Modal.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Trend Belanja Pemerintah Daerah TA 2010-2014.....	3
Grafik I.2 Belanja Modal Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2014.....	13
Grafik IV.1 Tingkat Kemandirian Kab Bekasi.....	55
Grafik IV. 2Hasil Uji Historgam .....	58
Grafik IV.3 Rata-rata efisiensi Penerimaan PAD.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Skema Value For Money.....	18
Gambar II.2 Kerangka Pemikiran.....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kriteria Tingkat Kemandirian .....	22
Tabel II.2 Kategori Tingkat Efektivitas .....	28
Tabel II.3 Hasil Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel IV.1 Perhitungan Pemilihan Sampel .....	52
Tabel IV.2 Hasil Analisis Deskriptif .....	53
Tabel IV.3 Hasil Uji kolerasi .....	58
Tabel IV.4 Hasil Perhitungan VIF .....	59
Tabel IV.5 Hasil Uji BPG .....	59
Tabel IV.6 Hasil uji Lm .....	61
Tabel IV.7 Output Regresi OLS .....	61
Tabel IV.8 Hasil Uji Regresi .....	62
Tabel IV.9 Uji t .....	64
Tabel Iv.10 Hasil uji Signifikansi .....	66
Tabel IV.11 Hasil Uji koefisien determinasi .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

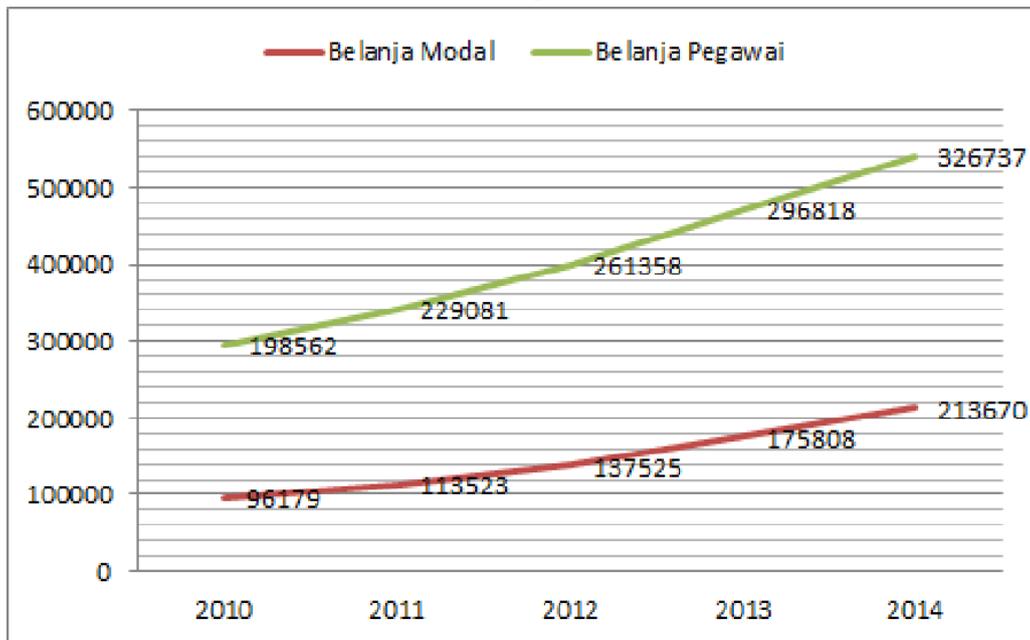
Perubahan politik nasional yang sejalan dengan pergantian penguasa telah memicu perubahan-perubahan penting disuatu pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Perubahan yang dimaksud yaitu sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari system pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada system pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kesejahteraan umum dapat terwujud.

Tidak hanya itu paradigma pengelolaan keuangan daerah setelah penerapan otonomi telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki yang merupakan bagian dari kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pertumbuhan ekonomi.

Aktivitas pembangunan dan pemerintahan di daerah tentu tak dapat dipisahkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan fiskal yang besar di era desentralisasi sangat menentukan struktur anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah (APBD). Dari substansi sebuah APBD dapat dilihat upaya atau keseriusan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan, atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai. Dari struktur dan porsi belanja dapat diketahui kecenderungan belanja, apakah cenderung pada penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur pemerintahan atau cenderung pada penyelenggaraan pembangunan daerah.

Perilaku pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan berpengaruh dalam proses penganggaran daerah. Struktur anggaran daerah mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, terutama jika melihat pada porsi belanja modal. Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Masalah pengalokasian ini terutama terkait dengan sumber daya. Tidak semua daerah kaya akan sumber daya dan potensi. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

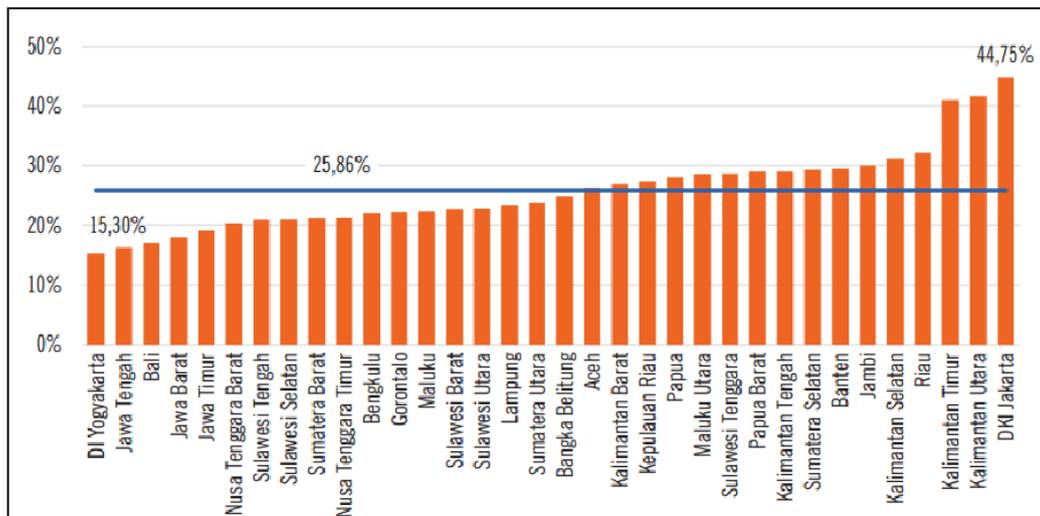
**Grafik I.1**  
**Trend Belanja Pegawai dan Belanja Daerah TA 2010-2014 (dalam Milyar Rupiah)**



Sumber: data diolah penulis (2015)

Namun berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2014 mengindikasikan bahwa belanja oleh pemerintah daerah sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja pegawai. Sedangkan alokasi belanja modal meskipun naik setiap tahun tapi pengalokasiannya masih mendapat porsi yang jauh lebih kecil. Alokasi belanja modal yang mendapat porsi yang jauh lebih kecil dapat menjadi suatu pertanyaan karena belanja modal merupakan belanja pemerintah yang bersifat produktif dan dapat digunakan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

**Tabel I.2**  
**Belanja Modal Terhadap Belanja Pemerintah Daerah**  
**Agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2014**



Sumber: DJPK, 2014

Berdasarkan APBD 2014 rata-rata agregat belanja modal yaitu sebesar 25,86%. Jika dibandingkan dengan rata-rata agregat tersebut hanya 16 provinsi yang memiliki rasio belanja modal lebih dari 25,86% sedangkan 18 provinsi lainnya berada dibawah rata-rata. Menurut Direktorat Jendral Keuangan Daerah (DJKD) Kementerian Dalam Negeri, idealnya alokasi belanja modal adalah 30% dari seluruh total belanja pemerintah daerah ([www.keuda.kemendagri.go.id](http://www.keuda.kemendagri.go.id), 2013). Artinya rata-rata agregat belanja modal yang menunjukkan angka 25,86% masih dibawah angka ideal menurut DJKD. Jika dibandingkan angka ideal pengalokasian belanja modal menurut DJKD sebesar 30%, maka hanya 6 provinsi yang berhasil mencapai rasio belanja modal tersebut.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal sebagai stimulus pembangunan. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya itu menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas dana perimbangan masih sangat tinggi, yaitu 90% ([www.bisniskeuangan.kompas.com](http://www.bisniskeuangan.kompas.com), 2014). Ringginya tingkat ketergantungan menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan dalam APBD masih bersumber dari transfer pemerintah pusat dan hanya sebagian kecil yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila daerah dapat menggali potensi daerahnya dan meningkatkan PAD maka akan berdampak pada ketersediaan dana untuk dialokasikan pada belanja produktif. Lebih lanjut rendahnya PAD mengakibatkan rendahnya ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Ruang fiskal dalam keuangan daerah mencerminkan fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah

tersebut untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

Selain itu menurut laporan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan tahun 2014 rata-rata Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD sebesar 8%. Ini menunjukkan bahwa adanya pengelolaan keuangan yang tidak cermat sehingga anggaran tidak terserap atau bisa juga berarti realisasi penerimaan jauh melebihi target.

Rendahnya alokasi belanja modal, tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer, rendahnya PAD serta rendahnya rasio ruang fiskal diakibatkan oleh masalah dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang belum dikelola dengan baik ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 2014). Padahal menurut Mardiasmo (2009) pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara baik dengan mencerminkan konsep *value for money*, yaitu ekonomis, efisien dan efektif.

Penelitian Alegre (2006) menunjukkan hasil empiris bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal di Spanyol. Abdulah & Halim (2006) menunjukkan bahwa rasio PAD dibandingkan total pendapatan tidak berasosiasi dengan belanja modal, sedangkan rasio dana transfer berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kusumawati (2010) menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efisiensi signifikan dengan belanja modal, sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sularso & Restianto (2011)

menunjukkan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan khususnya rasio ketergantungan dan rasio kemandirian.

Sedangkan Solikin (2013) menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan Fitri, Rasuli, & Silfi (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rasio pendapatan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Simanullang (2013) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oktora, Morasa, & Pangemanan (2013) menunjukkan PAD tidak berkontribusi terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DAK memiliki hubungan erat dengan alokasi belanja modal. Hidayat (2013) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan, tingkat pembiayaan Silpa, dan rasio ruang fiskal berpengaruh signifikan terhadap ruang belanja modal.

Paparan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah serta berbagai macam penelitian terdahulu yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang konsisten. Hal tersebut menjadi celah penelitian (*research gap*) bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah dalam mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan latar belakang diatas, dilakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian atas latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada yaitu

1. Rendahnya alokasi belanja modal dibandingkan belanja lainnya.
2. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah dalam sumber pendapatan daerah.
3. Tingginya SiLPA.
4. Rendahnya ruang fiskal dalam APBD.

## **C. Pembatasan Masalah**

Keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dalam penelitian ini hanya membatasi pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2009-2013 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembatasan penelitian dalam upaya pemecahan masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada Tingkat Kemandirian, Tingkat Pembiayaan SiLPA, Rasio Ruang Fiskal terhadap Belanja Modal. Penelitian dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya:

1. Apakah tingkat kemandirian berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?

2. Apakah tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?
3. Apakah ruang fiskal berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan berbagai pihak, antara lain

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi sector publik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan belanja modal.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai pengelolaan keuangan daerah sesuai konsep *value for money* supaya dapat berimplikasi kepada pembangunan dan pertumbuhan daerah.
  - b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para *stakeholder* untuk mengetahui tingkat

kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Deskripsi Konseptual**

##### **1. Belanja Modal**

###### **1.1 Pengertian Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal merupakan belanja pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan public. Untuk menambah asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan asset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan public yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007 pasal 53 ayat 2, asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal

dinilai sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 4 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan ini sejalan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP Nomor 7 yang mengatur tentang akuntansi asset tetap.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomer 2 mengenai Laporan Reliasasi Anggaran, jumlah belanja modal dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja} \\ & \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan} \\ & \text{Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset} \\ & \text{Lainnya} \end{aligned}$$

Sedangkan menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2014) belanja modal dapat diperbandingkan dengan keseluruhan total belanja untuk mengukur alokasi belanja modal yang dianggarkan sebagaimana diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Dalam sudut pandang ekonomi makro belanja modal memiliki arti yang penting karena menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Todaro (1998) menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah akumulasi modal

. Akumulasi modal dapat tercipta melalui investasi yang dianggarkan lewat belanja modal. Dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, investasi menjadi variable hitung yang penting dalam menghitung agregat pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1977).

Halim (2008) menyatakan bahwa kata investasi dapat diartikan macam-macam tergantung pada titik pandang atau konteks mengartikannya. Dalam bahasa ekonomi makro investasi dapat ditartikan berbeda dengan bahasa ekonomi mikro dan dapat berbeda pula dengan bahasa akuntansi. Dalam bahasa akuntansi pada konteks jenis belanja/biaya, investasi dapat dimunculkan dari adanya perbedaan anatara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Investasi yang termasuk dalam pengertian belanja modal adalah *capital expenditure*, yang didefinisikan sebagai belanja/biaya/pengeluaran yang memberi mandaaat lebih dari satu tahun. Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 2010 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengharuskan alokasi belanja modal dalam APBD sebesar 30%. Angka tersebut bukanlah kewajiban namun angka ideal untuk pembangunan. Karena itu memperbesar alokasi belanja modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah (DJPK, 2014).

## **1.2 Pendanaan Belanja Modal**

Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal (Zega, 2014). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain-lain pendapatan yang sah yaitu Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Sedangkan Pembiayaan daerah bersumber dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana cadangan daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **2 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2006). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomer 13 Tahun 2006 Pasal 3 pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Menurut publikasi Analisis dan Deskripsi APBD oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2014) pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui indikator struktur PAD dalam APBD, proporsi pos belanja produktif seperti belanja modal, besarnya SiLPA, dana fleksibel yang ditunjukkan dengan ruang fiskal, efisiensi realialisasi anggaran dan efektivitas anggaran.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Farci, 2012). Proses penyusunan hingga pengesahan APBD dilakukan pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Kerjasama pemerintah daerah dengan APBD tersebut menunjukkan hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah. Dalam perspektif teori keagenan pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* sedangkan

DPRD sebagai *principal*. Hubungan keagenan tersebut didasarkan atas UU Nomer 17 Tahun 2003.

Menurut UU Nomer 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi (Devas et al., 1989):

a. Akuntabilitas

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (Efektif) dan daya guna (efisien)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah- rendahnya dan dalam waktu yang secepat- cepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

### **2.1 Konsep *Value For Money***

Organisasi pemerintahan sering disebut sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi pemerintahan memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sector public yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu (Mardiasmo, 2009):

a. Ekonomi

Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi pemerintahan dapat meminimalisasi sumberdaya masukan yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

b. Efisien

Pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

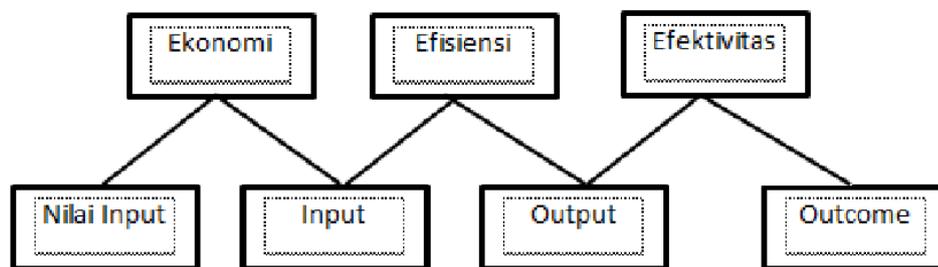
c. Efektivitas

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja tidak cukup. Menurut Mahmudi (2007) perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahteraan ekonmi. Selain keadilan, perlu dilakukan

distribusi secara merata. Artinya, penggunaan uang public hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

Secara skematis, value for money dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar II.1**  
**Skema *Value For Money***  
**Sumber: Mahmudi, 2007**

## 2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Implikasi dari penerapan konsep *value for money* dalam organisasi pemerintahan adalah perubahan dalam penganggaran menjadi anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*). Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau *item line budget* dengan pendekatan *incrementalism* ([www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id), 2009). Pendekatan tradisional hanya menekankan pada pos belanja (*object of expenditure*) pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja sehingga tidak memenuhi aspek *value for money* (Nordawati, 2006).

Anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dikenal sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang dalam pasal 8 dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang tidak disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public (Halim & Kusufi, 2012). Oleh karena itu anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan kinerja output.

Menurut Kurrohman (2013) kunci pokok untuk memahami Anggaran Berbasis Kinerja adalah pada kata "*Performance atau Kinerja*". Untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja yang menetapkan kinerja sebagai tujuan utamanya maka diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kinerja. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) indikator alokasi biaya, dan (2) indikator kualitas pelayanan.

### **2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hargyantoro, 2010). Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya kurang baik.

Kinerja keuangan diartikan sebagai suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator rasio keuangan (Halim, 2002). Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2008) dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja

keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, rasio keserasian, *debt services coverage ratio* (DSCR), dan rasio pertumbuhan.

### 2.3.1 Tingkat Kemandirian

Tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Hidayat, 2013). Tingkat Kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Menurut Nurhayati (2010) kriteria tingkat kemandirian dibagi menjadi enam kelompok sesuai yang di sajikan dalam table II.1 dibawah ini.

**Tabel II.1**  
**Kriteria Tingkat Kemandirian**

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0% - 10%	Sangat Kurang
10,1% - 20%	Kurang
20,1% - 30%	Sedang
30,1% - 40%	Cukup
40,1% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Nurhayati, 2010

Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Formulasi tingkat kemandirian adalah sebagai berikut (Halim, 2002):

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer \& Bantuan}}$$

Sedangkan menurut Hamzah (2008), Tingkat Kemandirian juga dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Dari kedua rumus untuk menghitung tingkat kemandirian tersebut maka dapat disimpulkan dibutuhkan jumlah nilai Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Bantuan, dan Total Pendapatan untuk dapat mengetahui berapa rasio kemandirian yang dimiliki daerah terkait.

#### **2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Dilingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Nordriawan, Putra and Rahmawati, 2009). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Nomer 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

a. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung (Siahaan 2008). Pajak daerah diantaranya terdiri pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak bumi bangunan dan lain-lain (Mardiasmo, 2011).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP No. 66 Tahun 2001). Pendapatan retribusi untuk provinsi adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan. Sedangkan pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota antara lain adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi biaya cetak KTP, dan retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil (Halim, 2007).

c. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, dan bagian laba atas penyertaan laba pada perusahaan swasta dan kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, dan lain-lain (Halim, 2007).

### **2.3.1.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan transfer lainnya (Nordiawan, Putra and Rahmawati, 2009).

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber DBH berasal dari pajak dan sumber daya alam, oleh karena DBH terbagi menjadi dua yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Formula penghitungan DAU adalah:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

di mana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria khusus. Dan program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

#### **2.3.1.3 Total Pendapatan**

Total Pendapatan adalah keseluruhan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah baik dari pendapatan yang bersumber dari daerah tersebut atau pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat. Secara spesifik komponen pendapatan dalam APBD menurut Pernyataan Standar Akuntansi Nomer 2 adalah Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan diatas; Pendapatan Transfer sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan diatas; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berasal dari Pendapatan hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

#### **2.3.2 Tingkat Pembiayaan SiLPA**

Tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mengukur penggunaan saldo lebih dari anggaran tahun sebelumnya yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal (DJPK, 2014). Semakin tinggi

rasio tingkat pembiayaan SiLPA menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki saldo lebih tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan untuk belanja anggaran tahun berikutnya. Tingkat pembiayaan SiLPA diformulasikan sebagai berikut (Hidayat 2013):

$$\text{Tingkat Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPAt} - 1}{\text{Total Belanja}}$$

dimana SiLPA menurut PSAP Nomer 2 didapat dari perhitungan berikut:

$$\text{SiLPA} = (\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Belanja}) + (\text{Penerimaan Pembiayaan} - \text{Pengeluaran Pembiayaan})$$

Dari rumusan diatas maka dapat disimpulkan diperlukan SiLPA dan Total Belanja untuk dapat mengetahui nilai Tingkat Pembiayaan SiLPA.

#### 2.3.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Selisih pengurangan pendapatan terhadap belanja pada realisasi APBD merupakan sisa dana yang dapat bernilai minus ataupun positif. Apabila sisa dana tersebut bernilai minus disebut defisit, dan jika positif disebut surplus, yang dalam APBD dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (DJPK, 2014). Dalam LRA terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat

berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto (Ritonga 2012).

Menurut Hidayat (2013) apabila terdapat nilai SiLPA yang sangat besar, hal ini mengindikasikan dua hal. Pertama, realisasi kinerja yang melebihi target sehingga terdapat sisa lebih anggaran. Ini berarti terdapat *free cash flow* yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan APBD tahun selanjutnya. Kedua, adanya kekurangcermatan dalam penyusunan anggaran maupun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, sehingga penyerapan anggaran belanja berpotensi kurang optimal. Anggaran belanja yang sudah dialokasikan semestinya dapat terserap pada tahun anggaran berkenaan. Penyerapan yang kurang optimal akan mengakibatkan adanya saldo (SiLPA) yang merupakan dana *idle* yang belum dimanfaatkan (DJPK, 2014).

Jika APBD tahun selanjutnya mengalami deficit maka untuk mengatasi deficit tersebut dapat menggunakan beberapa penerimaan pembiayaan salah satunya adalah SiLPA APBD tahun sebelumnya. SiLPA tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada

pemerintah pusat/daerah lain dan/atau pendapaan belanja peningkatan jaminan social (Ritonga 2012). Terkait dengan deficit anggaran tersebut pemerintah daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD atau APBD Perubahan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat satu bulan setelah APBD ditetapkan. Apabila pemerintah daerah tidak melaporkan maka dapat dikenai sanksi yaitu tidak diberikan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat (Yani 2009).

### **2.3.2.2 Total Belanja**

Undang-Undang Nomer 71 Tahun 2010 mendefinisikan belanja sebagai semua pengeluaran oleh Bendahar Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Keseluruhan anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran (DJP, 2014). Dalam akuntansi pemerintahan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas laporan.

Sesuai dengan PSAP Nomer 2 mengenai Laporan Realisasi Anggaran, belanja dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja operasi

adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek (Nordiawan, Putra, & Rahmawati, 2009). Belanja operasi diantaranya meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan social. Sedangkan belanja modal adalah belanja yang ditransformasikan menjadi asset sesuai dengan penjelasan pada sub bab 2 mengenai Belanja Modal. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana social dan lain-lain (Halim, 2002).

### **2.3.3 Rasio Ruang Fiskal**

Rasio Ruang Fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya (Boedi 2012). Rasio Ruang fiskal membandingkan antara ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap keseluruhan total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah (DJPK, 2013). Semakin tinggi nilai ruang fiskal menunjukkan pemerintah daerah memiliki fleksibilitas anggaran untuk dapat dialokasikan untuk membiayai hal tertentu. Ruang fiskal diperoleh dengan cara mengurangi pendapatan daerah dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarket*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga (Sudarwanto 2013). Efektifitas dan

efisiensi penggunaan anggaran daerah juga mendukung terciptanya ruang fiskal (DJPk, 2014). Sementara Rasio Ruang fiskal didapat dari total pendapatan dikurangi Dana Perimbangan dan dikurangi belanja operasi. Rasio ruang diformulasikan sebagai berikut (Hidayat 2013):

$$\text{Rasio Ruang Fiskal} = \frac{\text{Ruang Fiskal}}{\text{Total Pendapatan}}$$

di mana,

$$\text{Ruang Fiskal} = \text{Pendapatan} - \text{DAK} - \text{Dana Otsus} - \text{Dana Darurat} - \text{Hibah} - \text{Belanja Pegawai} - \text{Belanja Bunga}$$

Mengacu kepada laporan *Fiscal Policy for Growth and Development* (World Bank, 2006) dinyatakan bahwa ruang fiskal (*fiscal space*) tersedia, jika pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya tanpa mengancam solvabilitas fiskal (*fiscal solvency*). Heller (2005) mengatakan bahwa ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka pencapaian suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2014) ruang fiskal merupakan konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah tersebut. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki, maka akan semakin

besar pula fleksibilitas yang dimiliki untuk mengalokasikan belanja pada kegiatan yang menjadi prioritas daerah, seperti infrastruktur daerah.

Menurut Hidayat (2013) ruang fiskal bisa juga muncul dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan penurunan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran di suatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan memiliki terobosan untuk memanfaatkan ruang fiskal yang ada guna memacu pertumbuhan ekonomi.

## **2. Hasil Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan terhadap belanja modal. Abdulah & Halim (2006) menunjukkan bahwa rasio PAD dibandingkan total pendapatan tidak berasosiasi dengan belanja modal, sedangkan rasio dana transfer berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sularso & Restianto (2011) menunjukkan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan khususnya rasio ketergantungan dan rasio kemandirian. Kusnandar & Siswantoro (2012) dari hasil penelitian empirisnya menunjukkan bahwa secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan PAD, SiLPA, dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada level 1%.

Sedangkan Solikin (2013) menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan Fitri, Rasuli, & Silfi (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rasio pendapatan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sementara rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Wandira (2013) menunjukkan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal sementara DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal. Oktora, Morasa, & Pangemanan (2013) menunjukkan PAD tidak berkontribusi terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DAK memiliki hubungan erat dengan alokasi belanja modal. Hidayat (2013) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan, tingkat pembiayaan Silpa, dan rasio ruang fiskal berpengaruh signifikan terhadap ruang belanja modal. Secara ringkas hasil penelitian terdahulu disajikan dalam table berikut.

**Tabel II.3**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Abdulah, S., & Halim, A. Studi Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. <i>Jurnal Akuntansi Pemerintah</i> , 2(2), 17-32.	PAD (X1), Dana perimbangan (X2), Belanja Modal (Y1), Belanja Pemeliharaan (Y2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</li> <li>2. PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.</li> <li>3. Belanja modal berasosiasi terhadap belanja pemeliharaan.</li> </ol>
Sularso dan Restianto. 2011. Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. <i>Media Riset Akuntansi 1 (2) Agustus 2011</i>	Pertumbuhan ekonomi (Z), Belanja Modal (Y) Derajat desentralisasi (X1), tingkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja modal dipengaruhi tingkat ketergantungan, tingkat kemandirian, tingkat efektivitas.</li> <li>2. Alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi</li> </ol>

	ketergantungan (X2), tingkat kemandirian (X3), Efektivitas PAD (X4), kontribusi BUMD (X5)	3. Kinerja keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.
Kusnandar, & Siswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. <i>Simposium Nasional Akuntansi XV</i> . Banjarmasin.	DAU (X1), PAD(X2), SiLPA (X3), luas wilayah (X4), Belanja modal (Y)	1. DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal 2. PAD, SiLPA, dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada level 1%
Solikin, I. (2013). Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat. <i>FPEB UPI Bandung</i> .	PAD (X1), DAU (X2), Belanja modal (Y)	1. PAD memiliki hubungan positif dengan belanja modal sebesar 0.612 2. DAU memiliki hubungan positif dengan belanja modal sebesar 0.630
Oktora, Morasa & Pangemanan. 2013. Analisa Konstruksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas. <i>Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing</i> , 4(1).	PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), Belanja modal (Y)	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berkontribusi atas Belanja Modal karena rendahnya proporsi anggaran dan realisasi PAD dibandingkan sumber dana lainnya. 2. Dana Alokasi Umum berkontribusi secara signifikan atas Belanja Modal karena besarnya kucuran dana transfer dari Pemerintah Pusat 3. Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan yang erat dengan Belanja Modal akibat tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat

Hidayat, M. F. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal. <i>Jurnal Ilmiah FEB UB</i> , 2(2).	Efektivitas PAD (X1), Pembiayaan Silpa (X2), Ruang fiscal (X3), Belanja modal (Y),	Tingkat efektivitas, tingkat pembiayaan Silpa, dan rasio ruang fiscal berpengaruh signifikan terhadap ruang belanja modal
Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian Belanja Modal	Belanja modal (Y), PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4)	1. PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal 2. DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal 3. DAK berpengaruh terhadap Belanja modal 4. DBH berpengaruh terhadap belanja modal
Fitri, Rasuli, & Silfi. (2014). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal. <i>JOM UNRI Vol 1 No 1 2014</i> .	PAD (X1), rasio kemandirian (X2), rasio efektivitas (X3), rasio efisiensi (X4), DAU (x5), belanja modal (Y)	1. PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 2. Rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, DAU tidak signifikan terhadap belanja modal.
Dwirandra & Martini, Kadek (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan pada alokasi belanja modal di provinsi Bali.	Rasio Ketergantungan (X1), rasio efektivitas (X2), tingkat pembiayaan SiLPA (X3), ruang fiscal (X4, rasio kontribusi BUMD (X5)	1. Rasio ketergantungan negative signifikan 2. Rasio efektivitas tidak signifikan 3. Tingkat pembiayaan Silpa signifikan 4. Rasio kontribusi BUMD tidak signifikan
Aprizay, Yudi; Darwanis & Arfan, Muhammad (2014). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SiLPA terhadap belanja modal di Kabupaten Kota di Provinsi Aceh. <i>Jurnal Akuntansi Unsyiah</i> .	PAD (X1), Dana Perimbangan (X2), SiLPA(X3).	Ketiga variable bebas secara pasrial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Sumber: Data diolah penulis, 2015

### 3. Kerangka Teoritik

#### 1. Hubungan Tingkat Kemandirian dengan Pengalokasian Belanja Modal

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

Untuk mengukur seberapa besar pemerintah daerah mengandalkan PAD sebagai sumber daya untuk membangun daerahnya dapat digunakan Tingkat Kemandirian untuk mengukurnya. Semakin tinggi kemandirian ini berarti pemerintah daerah lebih banyak menggunakan PAD sebagai sumber dana pembangunan. Semakin tinggi tingkat kemandirian juga mengindikasikan ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan Fitri, Rasuli, & Silfi (2013) dan Sularso & Restianto (2011) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian belanja modal. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

## **2. Hubungan Tingkat Pembiayaan SiLPA dengan Pengalokasian Belanja Modal**

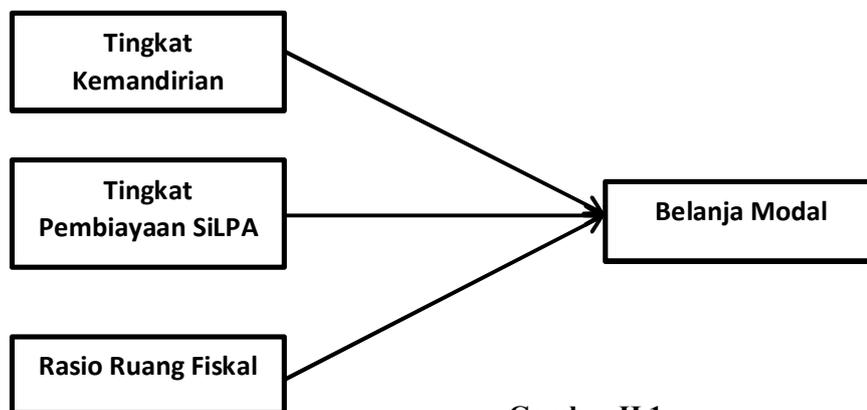
Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) merupakan dana *idle* yang muncul akibat adanya selisih realisasi anggaran dengan target anggaran pada tahun sebelumnya. SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun berkenaan apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) dan Kusnandar & Siswanto (2012) dan Hidayat (2013) menguatkan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

### **3. Hubungan Rasio Ruang Fiskal dengan Pengalokasian Belanja Modal**

Rasio Ruang Fiskal menggambarkan fleksibilitas anggaran yang dimiliki oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah. Rasio ruang fiskal sendiri membandingkan ruang fiskal dengan seluruh total pendapatan. Dimana ruang fiskal merupakan keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dikurangi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana darurat, hibah dan belanja rutin. Ruang fiskal bisa juga muncul dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan penurunan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran di suatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013) menunjukkan bahwa rasio ruang fiskal berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Sudarwanto (2013) dan Boedi

(2012) menyatakan semakin besar ruang fiskal dalam APBD akan semakin baik. Selain itu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam publikasi Deskripsi dan Analisis APBD 2014 menyatakan pentingnya pemerintah daerah untuk meningkatkan fleksibilitas anggaran melalui peningkatan rasio ruang fiskal.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar II.1**  
**Kerangka Pemikiran**  
 Sumber: Diolah penulis, 2015

#### 4. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritik yang telah dijelaskan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Tingkat Kemandirian Berpengaruh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

**H2: Tingkat Pembiayaan SiLPA Berpengaruh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

**H3: Rasio Ruang Fiskal Berpengaruh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada Bab I, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya hubungan antara:

1. Tingkat Kemandirian berpengaruh terhadap penganggaran belanja modal.
2. Tingkat Pembiayaan SiLPA berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.
3. Rasio Ruang Fiskal berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

#### **B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Objek dari penelitian ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009-2013 di Provinsi Jawa Barat. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pengaruh tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA dan rasio ruang fiskal terhadap belanja modal.

#### **C. Metode Penelitian**

Joker, Pennink, & Wahyuni (2011) memberikan pemahaman tentang metode penelitian dengan mengelompokkannya dalam dua tipe utama yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Sebaliknya pendekatan kualitatif

ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, dan analisis isi.

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Tingkat Kemandirian, Tingkat Pembiayaan SiLPA, dan Rasio Ruang Fiskal terhadap pengalokasian Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan rasio sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (dianalisis menggunakan program Eviews 8) sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan penelitian hingga mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini menganalisis 4 (empat) variabel yang terdiri 1 (satu) variabel dependen dan 3 (variabel) variabel independen.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data dalam penelitian ini adalah 19 kabupaten dan 8 kota di Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan LKPD yang sudah diaudit selama tahun 2009-2013. Namun karena salah satu kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten pemekaran yang baru berdiri pada 2012 maka jumlah kabupaten yang digunakan berkurang satu sehingga keseluruhan populasi dalam penelitian ini ada 26 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 8 Kota. LKPD tersebut juga harus memiliki kelengkapan elemen variable terutama

SiLPA, karena SiLPA merupakan sisa anggaran sehingga tidak selalu terdapat sisa anggaran. Dalam penelitian ini LKPD kabupaten kota keseluruhannya memiliki SiLPA.

Adapun pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai populasi karena provinsi ini merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbanyak sehingga diharapkan merepresentasikan kabupaten kota se-Indonesia. Batasan tahun 2009-2013 dipilih agar tetap relevan dengan kondisi saat penelitian ini berlangsung. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten kota yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel.

## **E. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

### **1. Variabel Terikat**

#### **1.1.1 Dekripsi Konspetual**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

#### **1.1.2 Dekripsi Operasional**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Modal yang dihitung menggunakan Rasio Belanja Modal. Perhitungan untuk Belanja Modal menggunakan acuan APBD. Belanja Modal merupakan keseluruhan total dari

Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya. Dalam penelitian ini Belanja Modal diperbandingkan dengan Total Belanja, diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

## 2. Variable Bebas

### 2.1 Tingkat Kemandirian

#### 2.1.1 Dekripsi Konseptual

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, dengan formulasi sebagai berikut (Hamzah 2008)

#### 2.1.2 Dekripsi Operasional

Dalam variabel ini, peneliti menggunakan rasio belanja modal untuk menghitung belanja modal. Peneliti Alat ukur pada variabel ini adalah pos belanja modal pada laporan realisasi APBD (Mahmudi,2007).

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

### 2.2 Tingkat Pembiayaan SiLPA

#### 2.2.1 Dekripsi Konseptual

Selisih pengurangan pendapatan terhadap belanja pada realisasi APBD merupakan sisa dana yang dapat bernilai minus ataupun positif. Apabila sisa dana tersebut bernilai minus disebut defisit, dan jika positif disebut surplus, yang dalam APBD dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Tingkat pembiayaan SiLPA mengukur SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk alokasi belanja (DJPK, 2014). Formulasinya adalah sebagai:

### 2.2.2 Dekripsi Operasional

Dalam penelitian ini untuk mendapat tingkat pembiayaan SiLPA, peneliti mengbandingkan proporsi SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan sebagai pembiayaan tahun ini dengan belanja modal keseluruhan (Hidayat, 2013).

$$\text{Tingkat Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPA}_{t-1}}{\text{Total Belanja}}$$

## 2.3 Rasio Ruang Fiskal.

### 2.3.1 Dekripsi Konseptual

Rasio Ruang Fiskal digunakan untuk mengukur fleksibilitas anggaran pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan (DJPK, 2014). Dana fleksibel tersebut adalah dana yang telah dikurangi pos yang telah diperuntukkan penggunaannya (*earmarked*).

### 2.3.2 Dekripsi Operasional

Rasio Ruang Fiskal sendiri membandingkan antara Ruang Fiskal yang dimiliki dengan Total Pendapatan, dimana Ruang Fiskal didapat dari total pendapatan dikurangi hibah, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Darurat,

Belanja Pegawai, Belanja Bunga (Hidayat, 2013). Formulasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ruang Fiskal} = \frac{\text{Ruang Fiskal}}{\text{Total Pendapatan}}$$

## F. Teknik Analisa Data

### 1. Model Regresi Berganda

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Menurut Winarno (2009) model regresi yang baik adalah model regresi yang dapat menghasilkan nilai residual terkecil. Semakin kecil nilai residual yang dihasilkan, maka semakin baik hasil dari model regresi tersebut. Nilai residual terkecil menunjukkan nilai estimasi yang dihasilkan oleh suatu analisis regresi akan mendekati nilai aktualnya. Regresi berganda sendiri merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya, yaitu untuk meramalkan nilai variable terikat (Y) apabila variable bebasnya (X) dua atau lebih (Muhidin dan Abdurahman, 2007). Untuk dapat menggunakan regresi linear berganda maka model tersebut harus memenuhi taksiran BLUE (*Best Linear Unbiased Estimate*) atau mempunyai sifat linear, tidak bias, dan memiliki varian minimum. Sifat BLUE tersebut adalah (Nachrowi and Usman 2008):

- a. Nilai harapan (*expected value*) atau rata-rata dari variable gangguan (residual/ $e_i$ ) adalah nol [ $E(u_i) = 0$ ]
- b. Tidak ada serial korelasi antara gangguan  $e_i$  yang satu dengan  $e_i$  yang lain atau tidak ada autokorelasi [ $Cov(u_b, X_t) = 0$ ]
- c. Varian dari variable gangguan ( $e_i$ ) adalah sama setiap periode waktu atau bersifat homokedastis [ $Var(u_i) = \sigma^2$ ]

- d. Model regresi dispefisikasi secara benar
- e. Tidak ada hubungan linier (koliniearitas) antara aggressor.

Dalam rangka memenuhi karakteristik estimator agar dapat bersifat BLUE maka akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas.

### 1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik. Uji grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Apabila bar histogram berpusat ditengah, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Namun ada metode yang lebih handal adalah dengan uji statistik. Pengujian normalitas residual yang banyak digunakan adalah uji jarque-bera (JB). Nilai JB statistik mengikuti distribusi chi-square dengan 2df (degree of freedom). Nilai JB selanjutnya dapat kita hitung signifikansinya untuk menguji hipotesis berikut:

$$H_0 = \text{residual terdistribusi normal}$$

$$H_a = \text{residual tidak terdistribusi normal}$$

Jika hasil dari JB hitung  $>$  *Chi Square* tabel, maka  $H_0$  ditolak. Jika hasil dari JB hitung  $<$  *Chi Square* tabel, maka  $H_0$  diterima. Selain membandingkan JB hitung dan chi square, kita juga bisa melihat signifikansi dari nilai p dengan estimasi sebagai berikut:

1. Jika nilai p di atas tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika nilai p di bawah tingkat signifikansi 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### **2.1 Uji Multikolinieritas**

Menurut (Yamin and Kurniawan 2011) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji jenis ini hanya diperuntukan untuk penelitian yang memiliki variabel independen lebih dari satu. Multikolinieritas dapat dilihat dengan menganalisis nilai VIF (Variance Inflation Factor). Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinieritas jika:

1. Tingkat korelasi >95%
2. Nilai Tolerance <0,10 atau
3. Nilai VIF >10.
4. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

### **2.2 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heterokedastisitas adalah dengan uji Breusch-Pagan-Godfrey. Hasil uji Breusch-Pagan-Godfrey mengindikasikan bahwa terjadi heterokedastisitas ditunjukkan dengan nilai Obs\*R-squared yang signifikan ( $<0.05$ )

### **2.3 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Nachrowi and Usman 2008). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Penelitian ini akan mendeteksi autokorelasi dengan Uji Lagrange Multiplier (LM Test). Uji autokorelasi dengan LM, terutama digunakan untuk amatan di atas 100 observasi. Interpretasi hasil LM test adalah sebagai berikut:

$H_0$ : tidak ada autokorelasi

$H_1$ : ada autokorelasi

Jika nilai  $p$  dari Obs\*R-squared signifikan secara statistik maka  $H_0$  ditolak.

### **3. Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan uji regresi model yang dijelaskan pada tahap diatas. Analisis regresi model digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji Hipotesis ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan LKPD yang dijadikan objek penelitian.
- b. Menghitung proksi dari masing–masing variabel sesuai dengan cara ukur yang telah dijelaskan.
- c. Melakukan uji regresi model dengan tahapan–tahapan yang telah dijelaskan di atas.

Pada penelitian ini digunakan Software Eviews 8.0 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Hubungan antara Belanja Modal dan proksi dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, tingkat pembiayaan SiLPA, dan rasio ruang fiskal yaitu:

$$\mathbf{BM = \beta_0 + \beta_1KM + \beta_2SiLPA + \beta_3RF + \epsilon_i}$$

Keterangan:

- $\beta_0$  = Koefisien regresi konstanta.
- $\beta_1,2,3,$  = Koefisien regresi masing-masing proksi.
- BM = Belanja Modal.
- KM = Tingkat Kemandirian.
- SiLPA = Tingkat Pembiayaan SiLPA
- RF = Rasio Ruang Fiskal.
- $\epsilon$  = *error*

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Goodness of Fit Model. Uji Goodness of Fit Model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual.

Secara statistik, terdapat beberapa cara untuk mengukur goodness of fit, yaitu dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

### **3.1 Uji Statistik t**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2007). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $t \leq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### **3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F merupakan uji model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut (Lind, Marchal and Wathen 2009). Pengujian dilakukan dengan

menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi  $f > 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedelapan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $f \leq 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 1.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Setelah menaksir parameter dan standar error-nya, perlu untuk diperiksa apakah model regresi terestimasi cukup baik atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, harus dilakukan suatu cara untuk mengukur seberapa dektkah garis regresi yang terestimasi dengan. Ukuran yang biasa digunakan untuk keperluan ini adalah koefisien determinasi ( $R^2$ ) (Nachrowi and Usman 2008)

Ukuran koefisien determinasi ini mencerminkan seberapa besar variasi dari *regressand* (Y) dapat diterangkan oleh *regressor* (X). Bila  $R^2 = 0$ , artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekli. Sementara  $R^2 = 1$ , artinya variasi dari Y, 100% dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila  $R^2 = 1$ , maka semua titik pengamatan berada garis regresi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui hubungan dari variable independen yaitu tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA, dan rasio ruang fiskal terhadap variable dependen yaitu belanja modal. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009 sampai dengan 2013. Data ini diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti yang sudah dijelaskan di bab III jumlah kabupaten dan kota yang digunakan sebanyak 26; terdiri dari 18 kabupaten dan 8 kota. Karena keseluruhan populasi tersebut memiliki kelengkapan variable yang digunakan sebagai sampel, maka keseluruhan populasi yang ada digunakan sebagai sampel. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel sendiri merupakan gabungan antara *cross section* dan *time series*. Secara sederhana, data panel dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan data (*dataset*) dimana perilaku unit *cross section* diamati sepanjang waktu (Ghazali, 2013). Unit *cross section* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah variable-variabel yang akan diuji yaitu belanja modal sebagai variable terikat, tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA, dan rasio ruang fiskal sebagai variable bebas. Variabel-variabel tersebut akan diamati sepanjang kurun waktu 2009 – 2013 yang merupakan unit *time series*. Sehingga jumlah observasi datanya sebanyak 130 (26 kab/kota X 5 tahun).

## B. Pengujian Hipotesis

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul untuk memberikan gambaran tentang data. Dengan hasil statistik deskriptif ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai data penelitian seperti nilai *minimum*, *maximum*, *mean* dan standar deviasi.

Statistik deskriptif dari 130 observasi yang dijadikan sebagai sampel dapat dilihat dari tabel IV.2 berikut ini.

**Tabel IV.2 Hasil Analisis Deskriptif**

Sample: 1 130

	BM	KM	SILPA	RF
Mean	<b>0.171139</b>	<b>0.132865</b>	<b>0.097843</b>	<b>0.325073</b>
Median	<b>0.156919</b>	<b>0.106210</b>	<b>0.083185</b>	<b>0.315697</b>
Maximum	<b>0.372982</b>	<b>0.330947</b>	<b>0.408322</b>	<b>0.574779</b>
Minimum	<b>0.053333</b>	<b>0.036644</b>	<b>0.002745</b>	<b>0.044738</b>
Std. Dev.	0.065165	0.075388	0.067078	0.113229
Skewness	0.954329	0.968718	1.309488	0.018814
Kurtosis	3.734725	3.008056	5.769313	2.313425
Sum	22.24812	17.27248	12.71956	42.25943
Sum Sq. Dev.	0.547802	0.733154	0.580428	1.653886
Observations	130	130	130	130

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

#### 1.1 Belanja Modal

Belanja Modal diukur dengan jumlah alokasi belanja modal dibagi jumlah keseluruhan total belanja dalam anggaran tahun berjalan. Jumlah rata-rata yang didapat dari belanja modal adalah 0,1711 atau 17,11%. Standar deviasi sebesar 0,065 menunjukkan besarnya jarak rata-rata pendapatan asli daerah terhadap rata-

rata hitung (*mean*). Rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa daerah belum mengalokasikan belanja modal secara optimal yaitu minimal 30% dari total belanja menurut ketentuan Kemendagri. Dari 130 sampel hanya 7 atau 5,3% yang mengalokasikan belanja modal lebih dari 30% yaitu Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2009, 2012, 2013, Kota Bekasi TA 2013, Kota Depok TA 2013, dan Kota Banjar TA 2011 dan 2013.

Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang merupakan kota penyangga serta daerah industri memang membutuhkan infrastruktur untuk menunjang aktivitas industri, oleh karena itu belanja modal kedua daerah tersebut cukup tinggi (BPS, 2013). Sementara Kota Banjar mengalokasikan belanja modal yang besar karena kota tersebut terbilang kota baru karena baru diresmikan tahun 2002, sehingga membutuhkan pembangunan secara massif. Untuk meningkatkan belanja modal tersebut, Kota Banjar menghentikan penerimaan pegawai baru aparatur daerah selama tiga tahun dari tahun 2009 – 2011 sehingga berhasil menekan belanja pegawai dan mengalokasikannya ke belanja modal ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), 2011). Selain Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Banjar, hampir semua kabupaten dan kota di provinsi di Jawa Barat masih mengalokasikan belanja terbesarnya ke belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Nilai maksimum belanja modal adalah sebesar 0,372 atau 37,2% yang dimiliki Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2012. Seperti yang sudah dijelaskan di atas Kabupaten Bekasi memang secara konsisten mengalokasikan belanja modalnya cukup besar. Nilai belanja modal tahun anggaran 2012 bahkan

meningkat 9,2% dari tahun sebelumnya dengan belanja modal 28%. Pencapaian ini terjadi karena pemerintah kabupaten menurunkan belanja operasional dan meningkatkan alokasi belanja modal. Pada tahun 2011 belanja modal kabupaten bekasi hanya Rp 643 Milyar, sedangkan pada tahun 2012 belanja modal meningkat drastic menjadi hampir Rp 1 triliun, tepatnya Rp 970 milyar. Salah satu pos belanja modal yang meningkat adalah belanja peralatan dan mesin dimana dalam hasil ini pada tahun 2011 nilainya 114 milyar dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 139 milyar. Pos belanja yang paling meningkat signifikan adalah belanja tanah dari Rp 1,2 milyar menjadi Rp 18 milyar, selain itu belanja jalan meningkat hampir 100% dari Rp 380 milyar menjadi Rp 613 milyar.

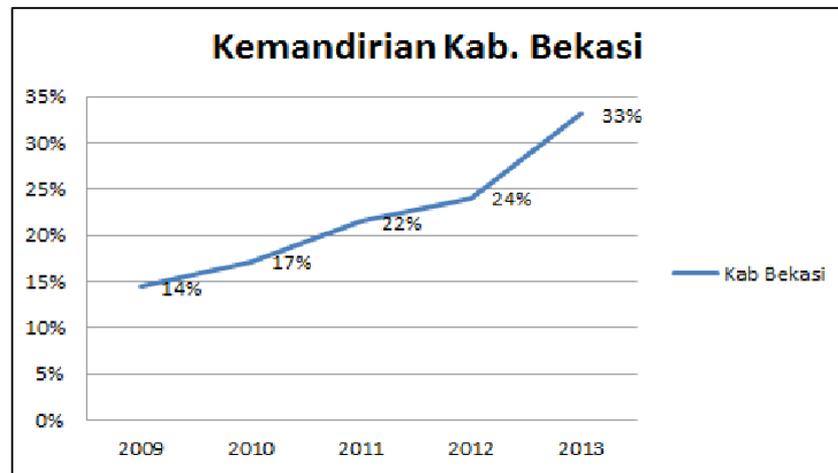
Nilai minimum belanja modal dimiliki oleh Kabupaten Garut dalam LKPD 2009 sebesar 0,053 atau sebesar 5,3%. Nilai ini bahkan jauh lebih kecil dari rata-rata belanja modal sebesar 0,17 atau 17%. Kecilnya nilai belanja modal ini terkait dengan perilaku penganggaran oleh pemimpin daerah. Hal ini ditunjukkan dari ketimpangan alokasi belanja modal dan belanja operasional yang sangat jauh. Total belanja operasional Kabupaten Garut mencapai Rp 1,3 triliun, dengan pos belanja pegawai mendominasi dengan hampir Rp 950 milyar dihabiskan untuk pos tersebut. Padahal disisi lain total belanja modal bahkan tidak sampai 10% dari total belanja pegawai, keseluruhan belanja modal yang dialokasikan hanya Rp 75 milyar dengan pos belanja jalan dan irigasi yang paling tertinggi yaitu Rp 28 milyar.

## 1.2 Tingkat Kemandirian

Tingkat Kemandirian diukur dengan membagi pendapatan asli daerah dengan keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah. Nilai rata-rata tingkat kemandirian sebesar 0,1328 atau 13,28%. Menurut Nurhayati (2010) persentase 10,1% - 20% dikategorikan kurang. Artinya rata-rata ini mengindikasikan bahwa hanya 13,28% dari pendapatan kabupaten dan kota yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan sisa pendapatan lainnya sebesar 86,72% bersumber sebagian besar dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta sebagian kecil bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi Hibah dan Dana Darurat. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kabupaten dan kota terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sangatlah tinggi. Artinya apabila pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak memberikan dana transfer maka dapat dipastikan pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki cukup dana untuk membiayai belanjanya.

Nilai maksimum sebesar 0,3309 atau 33,09% dimiliki oleh APBD Kabupaten Bekasi tahun 2013. Berdasarkan kriteria tingkat kemandirian oleh Nurhayati (2010) nilai 33,09% masuk ke dalam kategori cukup. Secara konsisten Kabupaten Bekasi memang terus meningkatkan tingkat kemandirian dari tahun 2009 hingga 2013 seperti yang ditunjukkan grafik IV.I dibawah ini. Pada tahun 2009 tingkat kemandirian Kabupaten Bekasi 14%, kemudian meningkat menjadi 17%, meningkat lagi menjadi 22%, 24% dan tahun 2013 sebesar 33%

**Grafik IV.I Tingkat Kemandirian Kab. Bekasi**



Sumber: data diolah penulis, 2015

Peningkatan ini dikarena Pemkab Bekasi terus menggali potensi PADnya; misalnya pendapatan dari sektor pajak daerah tahun 2013 yang meningkat sebesar Rp 300 milyar, Retribusi daerah meningkat Rp 26,7 milyar, sedangkan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah juga meningkat bahkan realisasinya jauh melebihi target anggaran. Disisi lain pendapatan transfer jumlahnya turun dari tahun sebelumnya dengan begitu juga menurunkan ketergantungan terhadap pemerintah.

Nilai minimum sebesar 0,0366 atau 3,66% dimiliki Kabupaten Tasikmalaya dalam LKPD tahun 2009. Nilai ini sangatlah rendah dibandingkan rata-rata tingkat kemandirian sebesar 13,28%. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada didaerahnya. Hal ini ditunjukkan dari realisasi penerimaan dari sektor retribusi daerah tahun 2009 yang hanya Rp 9,7 milyar padahal pada tahun 2008 pemkab berhasil mengumpulkan Rp 49 milyar. Penurunan yang sangat drastis ini dikarenakan pemkab tidak berhasil memaksimalkan potensi retribusi. Menurut

catatan BPK dalam laporan hasil audit, untuk pos Retribusi Ijin Gangguan Bidang Industri dan Perdagangan terdapat potensi Rp 36 milyar yang seharusnya dapat direalisasikan, sedangkan dari pos Retribusi Ijin Gangguan Bidang Perhubungan ada potensi sebesar Rp 10 milyar.

Meskipun begitu penerimaan dari pajak daerah memang meningkat meskipun tidak signifikan, nominal yang dikumpulkan relatif kecil yaitu hanya Rp 9,5 milyar dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi yang berhasil mengumpulkan pajak daerah sebesar Rp 300 milyar. Di sisi lain Dana Alokasi Umum menjadi andalan sumber pendapatan karena nilainya yang mencapai Rp 431 milyar. Padahal total pendapatan Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 709 milyar artinya sekitar 60% pendapatan kabupaten tersebut bersumber dari pos Dana Alokasi Umum.

### **1.3 Tingkat pembiayaan SiLPA**

Tingkat pembiayaan SiLPA diukur dengan membagi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan total belanja pada tahun berjalan. Nilai rata-rata tingkat pembiayaan SiLPA sebesar 0,097 menunjukkan bahwa pembiayaan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar 9,7%. Artinya sebesar 9,7% keseluruhan total belanja dapat dibiayai melalui pembiaayn SiLPA tahun lalu. Standar deviasi sebesar 0,067 menunjukkan besarnya jarak rata-rata pendapatan asli daerah terhadap rata-rata hitung (*mean*).

Nilai maksimum sebesar 0,408 atau sebesar 40,8% dimiliki oleh kabupaten bekasi pada LKPD tahun 2009. Nilai ini jauh diatas rata-rata pembiayaan SiLPA. Nilai Pembiayaan SiLPA tahun 2009 berasal dari sisa anggaran dari tahun 2008.

SiLPA ini muncul karena rata-rata realisasi pendapatan di kabupaten Bekasi pada tahun 2008 mencapai 115,2%, bahkan beberapa pos pendapatan realisasinya sangat tinggi antara lain Pendapatan Retribusi sebesar 177,2%, Lain-lain PAD yang Sah mencapai 207%, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 166%. Ini menunjukkan kemampuan kemampuan aparatur pemkab dalam mengumpulkan PAD sangat efisien ditunjukkan capaian yang sangat tinggi. Namun disisi lain serapan anggaran masih belum optimal. Nilai serapan belanja operasi sebesar 82,02%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp 536 milyar, namun serapannya hanya 27,6% atau sebesar Rp 148 milyar. Namun serapan belanja modal tersebut terus diperbaiki dengan meningkatnya belanja modal Kabupaten Bekasi tahun 2009, 2012, dan 2013 seperti yang telah diuraikan pada deskripsi belanja modal diatas. Dalam pos belanja modal tahun 2008 tersebut serapan yang paling tinggi yaitu untuk Belanja Peralatan sebesar 67% dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 69%.

Sedangkan nilai minimum sebesar 0,0027 atau sebesar 0,27% dimiliki oleh Kabupaten Subang tahun anggran 2011. Pembiayaan SiLPA ini berasal dari nilai sisa anggaran tahun sebelumnya yaitu 2010. Kecilnya nilai proporsi pembiayaan SiLPA 2011 menunjukkan sisa anggaran tahun 2010 tidaklah begitu besar. Kecilnya nilai sisa anggaran tersebut karena pencapaian dalam mengumpulkan relatife tidak terlalu signifikan atau kelebihan pencapaian setelah target tidak terlalu tinggi. Realisasi paling tinggi berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yaitu 117%, sementara capaian dari pos Pajak Daerah hanya 104,66%, artinya kelebihan capaian hanya 4,6%. Sisanya adalah Retribusi Daerah

dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah masing-masing 98,3% dan 99,6%. Meskipun tidak berhasil merealisasikan anggaran 100% namun capaian tersebut tidak terlalu buruk.

Sementara dari pos belanja realisasinya mencapai 93%. Realisasi belanja yang mencapai 100% hanya belanja subsidi sebesar Rp 2 milyar. Sementara dari pos belanja modal realisasinya mencapai 96%. Hampir keseluruhan pos-pos belanja modal realisasinya lebih dari 90% kecuali untuk belanja tanah yang dianggarkan Rp 3,5 milyar namun hanya dapat direalisasikan Rp 1 milyar atau 29% persennya saja.

#### **1.4 Rasio Ruang Fiskal**

Rasio Ruang fiskal merupakan dana fleksibel yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan salah satunya pembangunan infrastruktur. Nilai rata-rata ruang fiskal yang dimiliki sebesar 0,325 atau 32,5% ini berarti rata-rata pemerintah daerah memiliki dana fleksibel hampir sepertiga dari total anggaran. Standar deviasi sebesar 0,113 menunjukkan besarnya jarak rata-rata pendapatan asli daerah terhadap rata-rata hitung (*mean*).

Nilai maksimum sebesar 0,574 atau 57,4% dimiliki oleh Kabupaten Bekasi tahun 2013. Artinya lebih dari setengah anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah dana fleksibel yang dapat digunakan untuk belanja prioritas seperti pembangunan infrastruktur daerah. Ruang fiskal yang besar hanya dapat tercipta apabila pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan PADnya dan menjaga nilai pos yang telah ditentukan (*earmarked*) tetap lebih kecil dari PAD. Oleh karena itu rasio ruang fiskal erat kaitannya dengan tingkat

kemandirian. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian deskripsi tingkat kemandirian bahwa Kabupaten Bekasi tahun 2013 memiliki tingkat kemandirian yang paling tinggi. Nilai realisasi PAD tahun 2013 mencapai 113%. Sementara masing-masing pos yang telah ditentukan (*earmarked*) nilai realisasinya tidak melampaui target sehingga memperbesar nilai ruang fiskal misalnya nilai Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan Rp 114 miliar tapi hanya direalisasikan Rp 46 miliar dengan begitu mengurangi tingkat ketergantungan dan memperbesar ruang fiskal, Dana penyesuaian dari Rp 247 miliar hanya direalisasikan Rp 225 miliar, dan yang paling signifikan adalah menekan belanja modal dari anggaran Rp 1,3 triliun dan hanya direalisasikan Rp 1,15 triliun atau menghemat Rp 150 miliar.

Sedangkan nilai minimum 0,044 atau 4,4% dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2012. Nilai ruang fiskal yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta sangat jauh dari rata-rata ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah lain yaitu sebesar 32,55%. Kecilnya ruang fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan berdampak pada sulitnya pengalokasian dana untuk membiayai program-program pemerintah kabupaten. Hal ini karena Kabupaten Purwakarta hanya dapat merealisasikan PAD nya sebesar Rp 151 miliar dari anggaran sebesar Rp 199 miliar atau hanya sebesar 75%. Sedangkan pos-pos wajib yang telah ditentukan (*earmarked*) salah satu yang paling besar yaitu belanja pegawai nilainya mencapai Rp 950 miliar.

## **2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memperoleh model regresi yang bisa

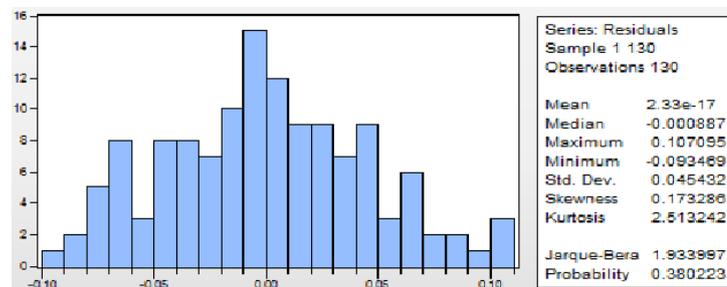
dipertanggung jawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias atau memiliki varian minimum atau sering disebut dengan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yang terdiri dari uji Normalitas, Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi.

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menentukan ketepatan model analisis yang dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Tahapan analisis awal untuk menguji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah:

## 2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Grafik IV 2. Grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri dan ke kanan, tetapi tepat di tengah. Dari hasil nilai Jarque-Bera diperoleh nilai 1,93. Nilai JB harus dibandingkan dengan nilai kritis *Chi-Square* 3df dengan signifikansi 0,05 yaitu 7,81. Dari hasil uji didapat  $1,93 < 7,81$  maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Selain itu, kita juga bisa melihat nilai p statistik sebesar 0,38 (lebih besar dari 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan  $H_0$  diterima yang menyatakan bahwa data terdistribusi normal (Ghazali, 2011)

**Grafik IV.2 Hasil Uji Histogram Normalitas**



Sumber: Output Eviews 8 (2015)

## 2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011).

**Tabel IV.3 Hasil Uji Korelasi**

	KM	SILPA	RF
KM	1.000000	0.321550	0.474495
SILPA	0.321550	1.000000	0.608643
RF	0.474495	0.608643	1.000000

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

Pada tabel diatas, hasil output matrix korealsi antara kesemua variable independen menunjukkan nilai  $<0,08$ . Sehingga, dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi antara tingkat kemandirian, SiLPA dan ruang fiskal. Jadi disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen.

Selain itu kita juga dapat melihat adanya multikolinearitas dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan hasil uji nilai VIF pada tabel IV.4 tidak ada yang lebih dari 10 (nilai VIF berkisar 1.29 sampai 1.84), jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel IV.4 Hasil perhitungan VIF menggunakan Eviews**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000157	9.664259	NA
KM	0.003728	5.342027	1.293409
SILPA	0.005796	5.005238	1.591928
RF	0.002354	17.14248	1.842065

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

### 2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

**Tabel IV.5 Hasil Uji Breusch-Pagan-Godfrey**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.084975	Prob. F(3,126)	0.3580
<b>Obs*R-squared</b>	<b>3.273686</b>	<b>Prob. Chi-Square(3)</b>	<b>0.3513</b>
Scaled explained SS	2.326858	Prob. Chi-Square(3)	0.5074

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 10/19/15 Time: 22:43

Sample: 1 130

Included observations: 130

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.001334	0.000689	1.936704	0.0550
KM	0.003899	0.003356	1.161808	0.2475
SILPA	0.003558	0.004185	0.850327	0.3968
RF	-0.000469	0.002667	-0.175716	0.8608
R-squared	0.025182	Mean dependent var		0.002048
Adjusted R-squared	0.001972	S.D. dependent var		0.002529
S.E. of regression	0.002527	Akaike info criterion		-9.093455
Sum squared resid	0.000804	Schwarz criterion		-9.005223
Log likelihood	595.0746	Hannan-Quinn criter.		-9.057604
F-statistic	1.084975	Durbin-Watson stat		1.569625
Prob(F-statistic)	0.358036			

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

Tabel diatas merupakan hasil output dari uji heterokedastisitas menggunakan Uji Breusch-Pagan-Godfrey (BPG). Output diatas menunjukkan nilai Obs\*R-squared mempunyai nilai probabilitas *Chi Square* yang tidak signifikan (nilai  $p=0,3513$ ). Dengan kata lain hipotesis nol tidak adanya heterokedastisitas dalam model tidak dapat ditolak.

## 2.4 Uji Autokolerasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan *standard error* hasil estimasi koefisien regresi tak bisa lagi digunakan. Pada penelitian ini untuk menguji autokorelasi peneliti menggunakan LM Test.

**Tabel IV.6 Hasil Uji LM Test**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	6.988445	Prob. F(2,124)	0.0013
<b>Obs*R-squared</b>	<b>13.16884</b>	<b>Prob. Chi-Square(2)</b>	<b>0.0014</b>

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 10/19/15 Time: 22:50

Sample: 1 130

Included observations: 130

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.005000	0.012200	0.409818	0.6826
KM	0.015517	0.061504	0.252287	0.8012
SILPA	0.034220	0.073389	0.466282	0.6418
RF	-0.031612	0.048715	-0.648915	0.5176
RESID(-1)	0.341976	0.091496	3.737591	0.0003
RESID(-2)	-0.078274	0.096461	-0.811459	0.4187
R-squared	0.101299	Mean dependent var		2.33E-17
Adjusted R-squared	0.065061	S.D. dependent var		0.045432
S.E. of regression	0.043929	Akaike info criterion		-3.367430
Sum squared resid	0.239290	Schwarz criterion		-3.235082
Log likelihood	224.8830	Hannan-Quinn criter.		-3.313653
F-statistic	2.795378	Durbin-Watson stat		1.995743
Prob(F-statistic)	0.019891			

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

Berdasarkan table di atas diperoleh nilai p dari Obs\*R-Squared signifikan pada 5% sehingga menunjukkan adanya autokolerasi. Salah satu cara mengoreksi

masalah autokolerasi adalah dengan metode Newey-West. Metode ini mengoreksi *standar error* regresi OLS menjadi *robust*, sehingga mengatasi bias yang terjadi karena *serial correlation* (Ghozali dan Ratmono, 2013)

**Tabel IV.7 Output Regresi OLS Setelah Dikoreksi Dengan Metode Newey-Test**

Dependent Variable: BM  
 Method: Least Squares  
 Date: 10/19/15 Time: 23:25  
 Sample: 1 130  
 Included observations: 130  
 HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 5.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.052935	0.015615	3.389916	0.0009
KM	0.229951	0.087378	2.631679	0.0096
SILPA	0.303767	0.072127	4.211530	0.0000
RF	0.178208	0.050421	3.534394	0.0006
R-squared	0.513946	Mean dependent var		0.171139
Adjusted R-squared	0.502373	S.D. dependent var		0.065165
S.E. of regression	0.045969	Akaike info criterion		-3.291395
Sum squared resid	0.266262	Schwarz criterion		-3.203163
Log likelihood	217.9407	Hannan-Quinn criter.		-3.255543
F-statistic	44.41010	Durbin-Watson stat		1.376918
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic		26.60868
Prob(Wald F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

Hasil output regresi diatas merupakan hasil koreksi *standar error* dengan metode Newey-West setelah ada masalah autokolerasi. Setelah koreksi *standar error* dilakukan nilai t dan nilai p berubah. Hasil diatas dapat langsung dilakukan dengan dalam laporan penelitian (Ghozali dan Ratmono, 2013).

### 3 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik selanjutnya dapat melakukan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari tingkat

kemandirian, tingkat pembiayaan silpa dan ruang fiskal terhadap belanja modal.

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil regresi berganda.

**Tabel IV.8 Hasil Uji Regresi Berganda**

Dependent Variable: BM  
Method: Least Squares  
Date: 10/19/15 Time: 23:25  
Sample: 1 130

Included observations: 130

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 5.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>C</b>	<b>0.052935</b>	<b>0.015615</b>	<b>3.389916</b>	<b>0.0009</b>
<b>KM</b>	<b>0.229951</b>	<b>0.087378</b>	<b>2.631679</b>	<b>0.0096</b>
<b>SILPA</b>	<b>0.303767</b>	<b>0.072127</b>	<b>4.211530</b>	<b>0.0000</b>
<b>RF</b>	<b>0.178208</b>	<b>0.050421</b>	<b>3.534394</b>	<b>0.0006</b>
R-squared	0.513946	Mean dependent var	0.171139	
Adjusted R-squared	0.502373	S.D. dependent var	0.065165	
S.E. of regression	0.045969	Akaike info criterion	-3.291395	
Sum squared resid	0.266262	Schwarz criterion	-3.203163	
Log likelihood	217.9407	Hannan-Quinn criter.	-3.255543	
F-statistic	44.41010	Durbin-Watson stat	1.376918	
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic	26.60868	
Prob(Wald F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang disajikan dalam Tabel IV.8 , dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.0529 + 0.2299 \text{ KM} + 0.3037 \text{ SILPA} + 0.1782 \text{ RF} + e$$

Penjelasan :

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = konstanta

KM = Tingkat Kemandirian

SILPA = Tingkat Pembiayaan Silpa

RF = Rasio Ruang Fiskal

e = Error

Dari persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0.0529 atau 5,29% artinya jika tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan silpa dan Rasio Ruang Fiskal bernilai konstan atau 0, maka variable bebas Belanja Modal akan naik sebesar 5,29%.
2. Koefisien regresi untuk variable tingkat kemandirian sebesar 0.2299 atau 22,9% berarti jika persentase variable ini dinaikkan 1 satuan sedangkan variable lain bernilai konstan atau 0 maka akan menyebabkan kenaikan pada belanja modal sebesar 22,9%
3. Koefisien regresi untuk variable tingkat pembiayaan silpa sebesar 0.3037 atau 30,37% berarti jika persentase variable ini dinaikkan 1 satuan sedangkan variable lain bernilai konstan atau 0 maka akan menyebabkan kenaikan pada belanja modal sebesar 30,37%.
4. Koefisien regresi untuk variable Rasio Ruang Fiskal sebesar 0.1782 atau 17,82% berarti jika persentase variable ini dinaikkan 1 satuan sedangkan variable lain bernilai konstan atau 0 maka akan menyebabkan kenaikan pada Belanja Modal sebesar 17,82%

### 3.2 Uji Statistik t

Uji Statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen. Untuk melakukan uji t harus didapatkan terlebih dahulu nilai t tabel. Cara mencari ttabel adalah dengan derajat kebebasan (df) yaitu  $n-k-1 = 130-3-1 =$

126, n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variable independen. Dengan daerajat kepercayaan 5%, didapatkan ttabel sebesar 1.979.

**Tabel IV.9 Hasil Uji Statistik t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.052935	0.015615	<b>3.389916</b>	<b>0.0009</b>
KM	0.229951	0.087378	<b>2.631679</b>	<b>0.0096</b>
SILPA	0.303767	0.072127	<b>4.211530</b>	<b>0.0000</b>
RF	0.178208	0.050421	<b>3.534394</b>	<b>0.0006</b>

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

Dari tabel hasil uji t, dapat disimpulkan:

1. Pengujian hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel diatas, variable tingkat kemandirian memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0096 ( $<0.05$ ). Hasil ini jelas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh terhadap belaja modal. Selain dari nilai signifikansi, dapat juga dilihat dari perbandingan t tabel dan t hitung, yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,63 > 1.979$ ). Dengan demikian maka H1 yang menyatakan bahwa rasio kemandirian memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja modal diterima. Nilai positif dari t hitung berarti memiliki arah hubungan positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio belanja modal memiliki hubungan positif signifikan terhadap belanja modal.

2. Pengujian hipotesis 2

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel diatas, variable tingkat pembiayaan SiLPA memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000 ( $<0.05$ ). Hasil ini jelas menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan silpa berpengaruh terhadap belaja

modal. Selain dari nilai signifikansi, dapat juga dilihat dari perbandingan  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$ , yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,21 > 1.979$ ). Dengan demikian maka  $H_1$  yang menyatakan bahwa tingkat pembiayaan silpa memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja modal diterima. Nilai positif dari  $t$  hitung berarti memiliki arah hubungan positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio belanja modal memiliki hubungan positif signifikan terhadap belanja modal.

### 3. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil uji  $t$  yang disajikan pada tabel diatas, variable Rasio Ruang Fiskal memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.0006 (<0.05)$ . Hasil ini jelas menunjukkan bahwa rasio ruang fiskal berpengaruh terhadap belanja modal. Selain dari nilai signifikansi, dapat juga dilihat dari perbandingan  $t$  tabel dan  $t$  hitung, yaitu  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $3,53 > 1.979$ ). Dengan demikian maka  $H_1$  yang menyatakan bahwa rasio Rasio Ruang Fiskal memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja modal diterima. Nilai positif dari  $t$  hitung berarti memiliki arah hubungan positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasio Ruang Fiskal memiliki hubungan positif signifikan terhadap belanja modal.

### 3.2 Uji Signifikan Simultas (F)

Untuk menguji hipotesis statistik  $F$ , pengujian ini melakukan perbandingan antara nilai  $F$  hitung dengan  $F$  tabel. Dengan derajat kepercayaan 5%,  $df_1$  (jumlah variabel-1) = 3, dan  $df_2$  ( $n-k-1$ ) atau  $130-3 = 127$  ( $n$  adalah jumlah observasi dan  $k$  adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk  $F$  tabel sebesar 2,68. Hasil uji  $F$  diperlihatkan pada tabel IV.10 dibawah ini.

**Tabel IV.10 Hasil Uji Signifikansi Simultan**

R-squared	0.556558
Adjusted R-squared	0.542253
S.E. of regression	0.044099
Sum squared resid	0.241145
Log likelihood	222.1567
<b>F-statistic</b>	<b>38.90768</b>
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai F-statistic sebesar 38,90. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa nilai F-hitung  $>$  F tabel yaitu  $38,90 > 2,68$ . Hal ini menunjukkan bahwa bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel independen yaitu tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SILPA, dan Rasio Ruang Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

### 3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan untuk variable-variabel independen dalam menjelaskan variable dependen sangat terbatas. Berikut adalah tabel hasil output dari uji koefisien determinasi:

**Tabel IV.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.513946
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.502373</b>
S.E. of regression	0.045969
Sum squared resid	0.266262
Log likelihood	217.9407
F-statistic	44.41010
Prob(F-statistic)	0.000000
Prob(Wald F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 8, data diolah oleh Peneliti (2015)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0.502. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 50,2% dari belanja modal dipengaruhi oleh variable-variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 49,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengaruh Tingkat Kemandirian dengan Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan antara tingkat kemandirian dengan belanja modal, variabel tingkat kemandirian memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh belanja modal terhadap PAD dapat dilihat pada Kabupaten Bekasi dimana kenaikan tingkat kemandirian pada tahun 2010 sebesar 17,2% kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 21,5%, tahun 2012 sebesar 24% dan tahun 2013 sebesar 33,1%. Hal ini berdampak pada rasio belanja yang juga naik dari tahun 2010 sebesar 23,3%, kemudian naik pada tahun 2011 sebesar 28%, selanjutnya pada tahun 2012 naik sebesar 9,3% menjadi 37,3% dan tahun 2013 menjadi 37,7%.

Sementara penurunan tingkat kemandirian dapat dilihat di Kota Sukabumi. Dalam kurun waktu 2010-2012, terjadi penurunan tingkat kemandirian dari 14,3% menjadi 13,1% hal ini berdampak pada rasio belanja modal yang dialokasikan dari 8,9% menjadi 8,6%. Penurunan belanja modal dikarenakan rendahnya tingkat kemandirian melalui penerimaan PAD yang sangat minim, sehingga pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki dana untuk belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian menjadi manjadi faktor kunci untuk meningkatkan belanja modal.

Tingkat kemandirian merupakan indikator untuk mengukur ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian ini diukur dengan seberapa besar porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total keseluruhan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

Adapun sumber pendapatan pemerintah daerah terbagi menjadi tiga bagian yaitu, PAD, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah. PAD merupakan sumber dana internal yang diperoleh dari sumber potensi penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi daerah. Sedangkan Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain yang sah merupakan sumber pendapatan eksternal.

Berbeda dengan PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatn yang telah ditentukan peruntukkannya. Hal ini karena kedua sumber dana ini bersumber dari pihak eksternal, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki wewenang penuh atas penggunaan dana ini (Kusnandar, 2012). Sedangkan PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaat potensi penerimaan pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana tersebut seluas-luas. Semakin besar PAD yang dihasilkan semakin besar pula dana yang dapat dialokasikan untuk penyediaan dan penyempurnaan seluruh infrastruktur daerah yang bermuara pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidupnya dan melakukan kegiatan usaha sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Dengan demikian peningkatan PAD selain menurunkan ketergantungan terhadap pemerintah daerah

juga menambah sumber pendanaan untuk pembangunan, pelayanan serta kegiatan pemerintah daerah.

Meskipun secara hasil statistic menunjukkan bahwa rata-rata 13,2% yang berarti dalam kategori menurut Nurhayati (2010) termasuk kriteria kurang, namun hasil regresi menunjukkan bahwa dengan tingkat kemandirian tersebut tetap berpengaruh terhadap alokasi belanja modal yang terus meningkat. Hal itu dikarenakan faktor otonomi daerah dimana daerah yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan daerahnya melalui peningkatan belanja modal (DJPK, 2014). Artinya meskipun pendapatan yang berasal dari internal yaitu PAD secara persentase terbilang kurang namun itu sangat berharga untuk dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk pembangunan daerah. Hal ini memang erat kaitannya dengan perilaku penganggaran dimana pemerintah kabupaten dan kota dituntut untuk mengalokasikan dana untuk prioritas dengan anggaran yang ada (Ritonga, 2012)

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2013) dengan sampel Kabupaten Kota Jawa Timur 2008-2012, Kusnandar (2012) dengan sampel Kabupaten Kota seluruh Indonesia tahun 2010; Dwirandra, Martini dan Kadek (2015) dengan sampel kabupaten dan kota di Provinsi Bali; Aprizay, Yudi; Darwanis dan Arfan, Muhammad (2014) dengan sampel 2014. Keempat penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa peningkatan PAD akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga menambah sumber dana dan meningkatkan alokasi belanja modal.

## **2. Pengaruh Tingkat Pembiayaan SILPA terhadap Belanja Modal**

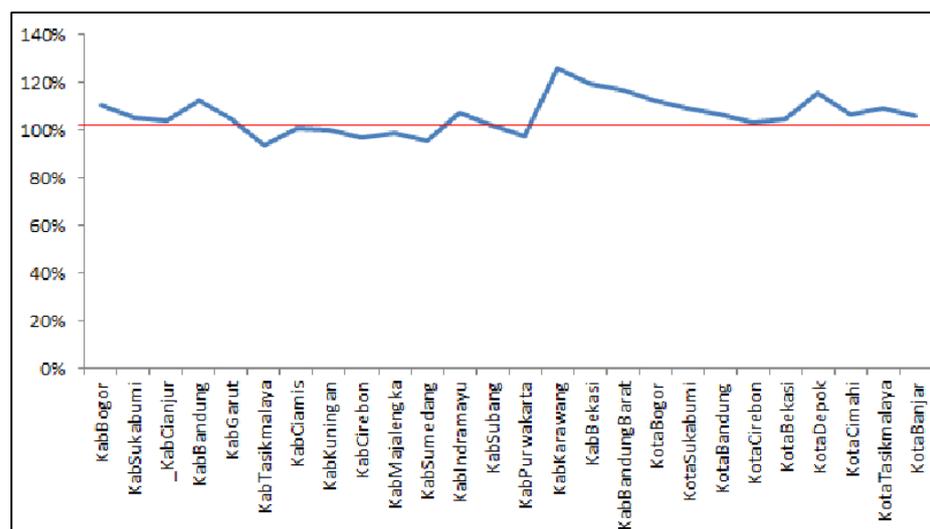
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan antara tingkat pembiayaan SILPA dengan belanja modal, variabel tingkat pembiayaan SILPA memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh kedua variable ini dapat dilihat di Kota Depok. Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 terjadi peningkatan SiLPA dari 20,8% menjadi 30%. Hal ini berdampak pada tersediannya pos Pembiayaan yang dapat digunakan untuk belanja daerah sehingga belanja modal Kota Depok juga meningkat dari 20,2% menjadi 34,8%.

Sedangkan penurunan SiLPA dapat dilihat di kabupaten subang dalam kurun 2009-2011. Dalam kurun waktu tersebut kabupaten subang mengalami penurunan SiLPA dari 1,5% menjadi 0,3% hal itu berdampak pada semakin sedikitnya pembiayaan yang dapat dilakukan sehingga belanja modal turun dari 15,7% menjadi 13,7%.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan apabila anggaran diperkirakan defisit, maka daerah harus menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dan demikian sebaliknya apabila anggaran diperkirakan surplus, maka daerah harus menetapkan penggunaan surplus tersebut. SiLPA tahun lalu merupakan penerimaan pembiayaan ditahun berikutnya untuk membiayai deficit anggaran tahun tersebut. Dengan demikian besarnya SiLPA tahun lalu dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran deficit anggaran berjalan yang masih mungkin dibiayai oleh pembiayaan netto.

Ditinjau dari teori kinerja keuangan, SiLPA yang besar dapat mengindikasikan kinerja yang baik atau buruk melalui efisien anggaran. Dikatakan kinerja keuangannya baik jika SiLPA berasal dari surplus anggaran, yang artinya realisasi penerimaan melebihi target sehingga penerimaan lebih besar dari belanja. Sedangkan kinerja keuangannya dikatakan kurang baik jika SiLPA terbentuk dari banyaknya belanja yang tidak terealisasi akibat kurang baiknya perencanaan (Hidayat, 2013). Untuk kasus kabupaten dan kota di Jawa Barat, jika melihat pada pencapaian target penerimaan yang cenderung melebihi target pada Grafik IV.3, maka dapat dikatakan kinerja keuangannya relatif baik, sehingga berpotensi membentuk SiLPA untuk tahun bersangkutan. Besarnya porsi SiLPA tahun lalu dalam struktur penerimaan pembiayaan ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja di tahun berikutnya.

**Grafik IV.3 Rata-Rata Efisiensi Penerimaan Tahun 2009-2013**



Sumber: Hasil diolah peneliti (2015)

Efisiensi terbesar dilakukan oleh Kabupaten Bekasi dengan efisiensi 119% dan Kabupaten Karawang dengan 120%. Letaknya yang secara ekonomis sebagai kota industri dengan banyak pabrik membuat kedua kabupaten ini berhasil mengoptimalkan penerimaan PAD nya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sehingga meningkatkan penerimaan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam kurun waktu 5 tahun dari 2009 dengan penerimaan pajak sebesar Rp 107 miliar kemudian pada tahun 2013 sebesar Rp 841 miliar. Sedangkan Kabupaten Karawang mengalami hal yang sama pada tahun 2009 penerimaan pajak Rp 65 miliar kemudian pada tahun 2013 menjadi Rp 466 miliar.

Sedangkan daerah dengan efisiensi yang rendah adalah Kabupaten Garut dan Tasik hal ini tidak mengherankan karena kedua daerah ini memang termasuk daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat, sehingga lebih banyak mengandalkan dan transfer dari pemerintah yang sifatnya terbatas, sedangkan potensi daerahnya dari pajak maupun retribusi tidak banyak proporsinya.

Adapun hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar (2012) dengan sampel Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia tahun 2010, dan Aprizay, Darwanis dan Arfan (2014) dengan sampel Kabupaten Kota di Provinsi Aceh. Hidayat (2013) dengan sampel kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ketiganya menyimpulkan besaran SiLPA pada tahun sebelumnya akan menjadi sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk belanja daerah pada anggaran tahun selanjutnya. Untuk itu SiLPA tercipta dari efisiensi anggaran menjadi pertimbangan dalam pengalokasian belanja modal.

### **3. Pengaruh Rasio Ruang Fiskal Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan antara Rasio Ruang Fiskal dengan belanja modal, variabel Rasio Ruang Fiskal memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh kedua variable ini dapat dilihat pada Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 2011-2012. Peningkatan ruang fiskal dari 44,8% menjadi 53,2% mengakibatkan peningkata belanja modal dari 28% menjadi 37,3%. Kabupaten Bogor tahun 2011 memiliki ruang fiskal 44% kemudian meningkat menjadi 54% pada tahun selanjutnya, hal ini berdampak pada alokasi belanja modal dari 21% tahun 2011 menjadi 28% tahun 2012.

Sedangkan penurunan rasio ruang fiskal dapat dilihat pada kabupaten Sukabumi pada tahun 2010 sampai dengan 2011 dari 14,3% menjadi 6,9%. Kabupaten Bogor pada mengalami penurunan rasio ruang fiskal pada tahun 2010 dengan nilai 46% kemudian turun menjadi 44% tahun 2011. Kemudian hal ini berdampak pada alokasi belanja modal yang juga turun dari 23,5% pada 2010 menjadi 21% tahun 2011. Penurunan ruang fiskal ini menunjukkan semakin sedikitnya dana bebas yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten dan kota sehingga membuat belanja modal turun dari 16% menjadi 11%.

Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah (Hidayat, 2013). Merujuk pada konsepnya, ruang fiskal dimaknai sebagai besarnya pendapatan yang tidak terikat (bebas) yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan (belanja) tanpa membahayakan kesinambungan fiskal daerah

(*fiskal sustainability*). Pendapatan yang bebas atau tidak terikat di sini adalah pendapatan setelah dikurangi pendapatan *earmarked* (pendapatan yang telah ditentukan penggunaannya) dan belanja wajib daerah (seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Ruang fiskal merupakan bagian yang harus mendapat perhatian serius. Ruang fiskal dapat diciptakan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan meningkatkan proporsi PAD kemudian berusaha menekan atau mengurangi pendapatan *earmarked* dan belanja wajib maka akan tercipta ruang fiskal yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh Kabupaten Bekasi tahun 2013 dimana keseluruhan penerimaan pada tahun tersebut menjadi besar karena kontribusi dari PAD yang cukup tinggi, disisi lain pendapatan dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi berkurang sehingga menciptakan ruang fiskal yang diidealkan. Selain itu memperbesar ruang fiskal dapat dilakukan dengan menekan pos belanja pegawai karena rasio ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin (Belanja Pegawai) menurut catatan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2014) secara agregat rata-rata rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah adalah 42%.

Memperbesar Rasio Ruang Fiskal daerah untuk Belanja Modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Selain itu, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di daerah juga dapat mendukung terciptanya Rasio Ruang Fiskal. Oleh karena itu semakin besar ruang fiskal yang dimiliki

suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martini dan Dwirandra (2015) dengan sampel kabupaten dan kota provinsi Bali dan Hidayat (2013) dengan sampel kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur dan penelitian Sudarwanto (2013). Ketiganya menyimpulkan bahwa dana fleksibel sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena dana idle tersebut dapat dengan bebas digunakan oleh pemerintah kabupaten atau kota.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kemandirian, pembiayaan SiLPA, dan Rasio Ruang Fiskal terhadap belanja modal. Periode penelitian dilakukan selama 5 tahun yaitu tahun 2009-2013 dengan sampel 18 kabupaten dan 8 kota di Provinsi Jawa Barat dengan keseluruhan observasi sebanyak 130. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t yang memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi berada dibawah taraf signifikansi sebesar 0,05 yang berarti memiliki arah hubungan positif sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian semakin besar belanja modal. Tingginya tingkat kemandirian menunjukkan besarnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain, semakin besar PAD maka pemerintah kabupaten atau kota memiliki ketersediaan dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemerintahnya, salah satunya pembangunan infrastruktur berupa bangunan, tanah, jalan dll yang dialokasikan dalam belanja modal.

2. Tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t yang memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi berada dibawah taraf signifikansi sebesar 0,05 yang berarti memiliki arah hubungan positif sehingga semakin besar tingkat pembiayaan SiLPA semakin besar belanja modal. Hal ini dikarenakan dalam struktur APBD, SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan APBD tahun selanjutnya. Sehingga pemerintah daerah memiliki dana tambahan dari SiLPA yang dapat digunakan untuk mebiayai belanja modal.
3. Ruang fiscal berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t yang memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi berada dibawah taraf signifikansi sebesar 0,05 yang berarti memiliki arah hubungan positif sehingga semakin besar Rasio Ruang Fiskal semakin besar belanja modal. Hal ini karena ruang fiscal menunjukkan besarnya dana fleksibel yang dimiliki pemerintah setelah dikurangi dengan pendapatan yang telah ditentukan penggunaannya. Artinya semakin besar ruang fiscal maka pemerintah kabupaten atau kota memiliki dana fleksibel yang dapat digunakan untuk membiayai belanjaja modal.

## **B. Implikasi**

Hasil temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat kemandirian, tingkat pembiayaan SiLPA dan ruang fiscal mempengaruhi belanja modal. Maka implikasi dari hasil penelitian ini adalah:

1. Tingkat kemandirian berpengaruh terhadap belanja modal. Tingkat kemandirian mengukur seberapa besar realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan transfer. Pendapatan ini tentunya sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten dan kota untuk membiayai belanja modalnya. Apabila daerah memiliki PAD yang besar maka dapat tersedia cukup pendanaan untuk mebiayai belanja modal. Untuk itu pemerintah daerah harus lebih fokus pada upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dicapai dengan efisiensi dalalam penerimaan PAD, mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi serta menggali potensi dan sumber daya daerah yang belum termanfaatkan dengan maksimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah. Dengan meningkatnya kemandirian, otomatis tingkat ketergantungan dapat direduksi.
2. Tingkat pembiayaan SiLPA mempengaruhi belanja modal hal ini karena SiLPA membentuk sisa anggaran pada tahun sebelumnya. Berdasarkan ketentuan undang-undang SiLPA dapat dijadikan sumber pembiayaan dalam APBD tahun selanjutnya. Dengan pembiayaan tersebut pemerintah kabupaten dan kota memiliki tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahnya, salah satunya melalui pos belanja modal. Namun idealnya SiLPA tersebut berasal dari efisien anggaran dan bukan karena rendahnya capaian realisasi anggaran. Salah satu bentuk efisiensi adalah pemerintah daerah harus mampu merealisasikan pendapatan asli daerah lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

3. Rasio Ruang fiskal berpengaruh terhadap belanja modal. Dana fleksibel yang tercipta akibat adanya ruang fiskal membuat pemerintah kabupaten atau kota memiliki dana bebas yang dapat dialokasikan untuk pos belanja modal. Untuk itu pemerintah harus memperbesar ruang fiskal. Untuk memperbesar ruang fiskal daerah, pemerintah daerah dapat melakukannya melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan efisiensi anggaran. Dalam rangka efisiensi anggaran, pemerintah daerah perlu mengkaji kembali apa yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya. Belanja-belanja yang bersifat konsumtif tetapi memberikan *multiplier effect* yang kecil dalam perekonomian hendaknya dikurangi atau diperketat lagi seperti belanja mengikat misalnya belanja pegawai dan belanja bunga.

### C. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Sampel penelitian belum mencakup semua kabupaten dan kota yang ada di Indonesia secara periode 2009-2013 dikarenakan kekurangan data yang dibutuhkan dari BPK maupun website resmi Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehingga hasil ini belum mewakili dan menggambarkan secara utuh dan kompleks mengenai belanja modal di Indonesia
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan beberapa variabel yang memang berdampak besar bagi belanja modal seperti tingkat kemandirian, SiLPA dan ruang fiskal.

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah :

1. Bagi peneliti
  - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah periode penelitian atau lebih spesifik terhadap kabupaten / kota agar hasil penelitian mengenai pendapatan asli daerah lebih luas, akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
  - b. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah seperti tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas.
  - c. Penelitian selanjutnya disarankan juga untuk menggunakan *e-views* dikarenakan program tersebut lebih akurat dalam menghitung penelitian yang berupa data panel serta lebih mudah dan ringkas membantu peneliti untuk dapat membuat penelitian yang lebih baik.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Peneliti mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota melakukan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan potensi pajak, retribusi dan sumber daya alam sehingga pemerintah kabupaten dan kota dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Selain itu berdampak juga terhadap besarnya SiLPA yang tercipta sehingga dapat membiayai APBD tahun selanjutnya, dan dapat memperbesar ruang fiscal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Syukriy, dan Abdul Halim. Studi Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2, no. 2 (2006): 17-32.
- Alegre, Juan G. *Decentralization and the Composition of Public*. European University Institute. Spain, 2006.
- Aprizay, Yudi; Darwanis & Arfan, Muhammad. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Aceh. *Jurnal Akuntansi Pasca SARjana Universitas Syiah Kuala* (2014): 140-149
- Bank, World. *Fiscal Policy for Growth and Development: An Interim Report*. 2006.
- Boedi, Soelistijono. Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread* 2, no. 2 (Oktober 2012).
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Both, Kenneth Davey, and Roy Kelly. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Analisis dan Deskripsi Analisis APBD 2014*. Jakarta, 2014
- Dwirandra, & Martini, Kadek. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. 2015. *E-Jurnal Akuntansi Udayana* 10.2 (2015): 426-443.
- Fitri, Vella Kurniasih, M Rasuli, and Alfiati Silfi. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal*. FE Universitas Riau. Riau, 2013.
- Ghozali, Imam & Dwi Ratmono. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2013
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS 19*. Edisi 6. Semarang: Universitas Diponegoro. 2011
- Hamzah, Ardi. *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan*. SNA 11 Pontianak, 2008.

- Halim, Abdul. Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.
- Halim, Abdul, and Syam Kusufi. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Heller, Peter. Understanding Fiscal Space. IMF Policy Discussion Paper, 2005.
- Hidayat, Mochamad Fajar. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal. Jurnal Ilmiah FEB UB 2, no. 2 (2013).
- Joker, Jan, Bartjan Pennink, and Sari Wahyuni. Metodologi Penelitian Untuk Master dan Ph.D di Bidang Manajemen. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Kurrohman, Taufik. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money. Jurnal Dinamika Akuntansi 5, no. 1 (2013): 1-11.
- Kusnandar, and Dodik Siswantoro. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin, 2012.
- Kusumawati, Vegasari Endah. Faktor-faktor yang Menentukan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Indonesia. FE UMY. Yogyakarta, 2010.
- Lind, Douglas, wiliam Marchal, and Samuel Wathen. Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: STIM YKPN, 2007.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009.
- Muhidin, Sambas Ali, and Maman Abdurahman. Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nachrowi, Nachrowi Djalal, and Hardius Usman. Penggunaan Teknik Ekonometrika. Jakarta: Grafindo, 2008.
- Nordiawan, Deddi. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, and Maulidah Rahmawati. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

- Oktora, Fahri Eka, Jenny Morasa, and Sifrid S Pangemanan. Analisa Konstruksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 4, no. 1 (Juni 2013).
- Ritonga, Irwan Taufiq. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pasca Sarjana UGM, 2012.
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Solikin, Ikin. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat. *FPEB UPI* 2013. Bandung, 2013.
- Sudarwanto, Adenk. Analisis APBD Tahun 2012. *Jurnal STIE Semarang* 5, no. 1 (Februari 2013).
- Sularso, Havid, and Yanuar E Restianto. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi* 1, no. 2 (2011): 109-124.
- Todaro, Michael P. *Economics For A Developing World*. London: Longman, 1977.
- . *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 1998.
- Wahyono, Teguh. *25 Model Analisis Statistik dengan SPSS 17*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Wandira, Arbie Gugus. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013).
- Yamin, Sofyan, and Heri Kurniawan. *SPSS complete teknik analisis statistik terlengkap dengan SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek, 2011.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/13/1422439/Ini.Enam.Catatan.BPK.soal.Pengelolaan.Keuangan.Pemerintahan.SBY> diakses 20 Februari 2015
- <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen> diakses 20 Februari 2015

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=628> diakses 2 maret 2015

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/10/31/ne9q77-ternyata-pengelolaan-keuangan-daerah-banyak-masalah> diakses 19 Februari 2015.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/04/04/04073968/> diakses 10 Januari 2015

<http://www.wartapriangan.com/kota-tasikmalaya-daerah-termiskin-di-jawa-barat/4417/> Diakses 9 Januari 2015

<http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/74> Diakses 8 Januari 2015

**LAMPIRAN 1****SAMPEL PENELITIAN**

No	Kabupaten/Kota
1	Kab Bogor
2	Kab Sukabumi
3	Kab Cianjur
4	Kab Bandung
5	Kab Garut
6	Kab Tasikmalaya
7	Kab Ciamis
8	Kab Kuningan
9	Kab Cirebon
10	Kab Majalengka
11	Kab Sumedang
12	Kab Indramayu
13	Kab Subang
14	Kab Purwakarta
15	Kab Karawang
16	Kab Bekasi
17	Kab Bandung Barat
18	Kota Bogor
19	Kota Sukabumi
20	Kota Bandung
21	Kota Cirebon
22	Kota Bekasi
23	Kota Depok
24	Kota Cimahi
25	Kota Tasikmalaya
26	Kota Banjar

## LAMPIRAN 2

## BELANJA MODAL

obs	BM	TB	BM
KabBogor-2009	510.324.974.669,00	2.179.663.902.055,00	0,23
KabBogor-2010	612.386.350.945,00	2.603.523.610.284,00	0,24
KabBogor-2011	703.670.729.991,00	3.207.105.283.274,00	0,22
KabBogor-2012	1.035.467.433.416,00	3.622.074.197.808,00	0,29
KabBogor-2013	1.316.781.706.310,00	4.531.985.614.318,00	0,29
KabSukabumi-2009	148.639.730.574,80	1.267.699.589.183,80	0,12
KabSukabumi-2010	258.510.711.863,00	1.615.098.489.079,00	0,16
KabSukabumi-2011	202.654.073.240,00	1.837.861.324.937,80	0,11
KabSukabumi-2012	268.721.244.979,00	1.984.308.232.949,00	0,14
KabSukabumi-2013	392.139.039.436,00	2.419.989.128.345,00	0,16
KabCianjur-2009	162.007.786.183,00	1.238.530.233.344,48	0,13
KabCianjur-2010	224.832.749.280,00	1.433.276.658.278,71	0,16
KabCianjur-2011	222.509.753.340,00	1.776.907.558.536,00	0,13
KabCianjur-2012	322.640.716.696,80	1.972.485.430.338,88	0,16
KabCianjur-2013	309.901.421.702,80	2.152.007.359.077,14	0,14
KabBandung-2009	148.925.370.067,00	1.746.674.817.198,38	0,09
KabBandung-2010	198.090.778.260,00	2.073.603.127.840,00	0,10
KabBandung-2011	172.470.535.785,00	2.428.383.916.449,00	0,07
KabBandung-2012	489.588.416.448,00	2.788.973.075.378,00	0,18
KabBandung-2013	449.078.124.664,00	3.162.356.298.270,50	0,14
KabGarut-2009	75.464.673.682,00	1.414.967.696.404,00	0,05
KabGarut-2010	155.205.402.443,00	1.689.071.148.835,00	0,09
KabGarut-2011	180.601.217.327,00	2.011.157.111.530,00	0,09
KabGarut-2012	312.790.040.830,00	2.131.939.922.010,00	0,15
KabGarut-2013	692.368.428.641,00	2.934.042.970.927,00	0,24
KabTasikmalaya-2009	118.847.625.133,00	687.947.280.646,00	0,17
KabTasikmalaya-2010	185.630.211.095,00	1.356.159.391.203,00	0,14
KabTasikmalaya-2011	167.143.625.168,00	1.501.367.333.471,00	0,11
KabTasikmalaya-2012	354.485.347.864,00	1.820.803.137.277,00	0,19
KabTasikmalaya-2013	488.363.197.158,00	2.155.866.635.930,00	0,23
KabCiamis-2009	81.881.618.400,00	1.200.925.783.825,00	0,07
KabCiamis-2010	120.099.464.487,00	1.380.941.032.459,00	0,09
KabCiamis-2011	211.847.747.805,00	1.622.254.043.765,00	0,13

Obs	BM	TB	Rasio BM
KabCiamis-2012	251.837.622.131,00	1.760.358.019.447,00	0,14
KabCiamis-2013	391.395.028.710,00	2.179.423.542.651,00	0,18
KabKuningan-2009	46.070.278.794,00	854.737.145.987,00	0,05
KabKuningan-2010	127.190.553.164,00	1.094.351.959.688,00	0,12
KabKuningan-2011	188.794.369.899,00	1.247.379.255.668,00	0,15
KabKuningan-2012	256.958.026.632,00	1.393.538.700.959,00	0,18
KabKuningan-2013	259.869.947.676,00	1.576.541.981.019,00	0,16
KabCirebon-2009	92.024.817.541,00	620.625.958.024,00	0,15
KabCirebon-2010	140.365.711.137,00	749.767.900.000,00	0,19
KabCirebon-2011	194.434.760.633,00	1.683.613.428.435,00	0,12
KabCirebon-2012	338.952.749.390,00	1.967.149.727.443,00	0,17
KabCirebon-2013	324.170.935.193,00	2.256.876.527.139,00	0,14
KabMajalengka-2009	120.561.897.970,00	883.460.228.083,00	0,14
KabMajalengka-2010	171.765.220.518,00	1.134.530.896.200,00	0,15
KabMajalengka-2011	195.921.116.510,00	1.287.193.140.716,00	0,15
KabMajalengka-2012	351.001.581.653,00	1.525.083.235.032,00	0,23
KabMajalengka-2013	385.174.996.026,00	1.726.776.332.879,00	0,22
KabSumedang-2009	96.777.123.501,00	951.660.808.625,00	0,10
KabSumedang-2010	102.602.892.282,00	1.120.252.427.611,00	0,09
KabSumedang-2011	154.987.044.351,00	1.241.804.252.689,00	0,12
KabSumedang-2012	204.371.006.983,00	1.424.520.294.893,00	0,14
KabSumedang-2013	253.554.444.160,00	1.640.920.557.120,00	0,15
KabIndramayu-2009	174.769.060.168,00	1.183.418.335.797,00	0,15
KabIndramayu-2010	123.497.618.335,00	1.299.806.918.501,00	0,10
KabIndramayu-2011	229.034.821.018,00	1.570.672.759.338,00	0,15
KabIndramayu-2012	357.178.062.102,00	1.842.450.693.026,00	0,19
KabIndramayu-2013	234.540.001.656,00	2.119.997.907.136,00	0,11
KabSubang-2009	168.592.432.835,00	1.074.026.971.330,00	0,16
KabSubang-2010	148.249.417.812,00	1.239.355.076.029,00	0,12
KabSubang-2011	184.706.770.168,00	1.351.795.557.956,00	0,14
KabSubang-2012	230.142.267.197,00	1.481.609.290.807,00	0,16
KabSubang-2013	291.168.432.035,00	1.778.350.906.250,00	0,16
KabPurwakarta-2009	103.648.700.983,00	722.124.353.006,00	0,14
KabPurwakarta-2010	126.161.699.177,00	862.876.316.666,00	0,15
KabPurwakarta-2011	144.490.975.126,00	962.771.230.654,00	0,15
KabPurwakarta-2012	166.565.692.417,00	1.114.438.309.602,00	0,15
KabPurwakarta-2013	231.762.332.172,00	1.354.385.032.662,00	0,17

Obs	BM	TB	Rasio BM
_KabKarawang-2009	198.265.162.102,00	1.243.238.534.751,00	<b>0,16</b>
_KabKarawang-2010	215.659.021.690,00	1.522.989.245.712,00	<b>0,14</b>
_KabKarawang-2011	197.927.903.203,00	1.832.297.832.169,00	<b>0,11</b>
_KabKarawang-2012	645.768.234.137,00	2.382.740.922.128,00	<b>0,27</b>
_KabKarawang-2013	571.414.149.618,00	2.719.098.263.802,00	<b>0,21</b>
_KabBekasi-2009	664.800.165.380,00	1.895.092.358.697,00	<b>0,35</b>
_KabBekasi-2010	391.290.243.010,00	1.682.031.523.500,00	<b>0,23</b>
_KabBekasi-2011	643.501.281.377,00	2.295.728.180.761,00	<b>0,28</b>
_KabBekasi-2012	970.051.419.271,00	2.600.798.894.300,00	<b>0,37</b>
_KabBekasi-2013	1.078.640.000.532,00	3.196.402.212.818,00	<b>0,34</b>
_KabBandungBarat-2009	99.685.853.525,00	760.546.528.891,00	<b>0,13</b>
_KabBandungBarat-2010	157.567.031.404,00	987.754.548.838,00	<b>0,16</b>
_KabBandungBarat-2011	149.207.384.498,00	1.251.596.015.396,00	<b>0,12</b>
_KabBandungBarat-2012	351.375.689.865,00	1.501.192.558.392,00	<b>0,23</b>
_KabBandungBarat-2013	318.589.528.729,00	1.680.101.451.150,05	<b>0,19</b>
_KotaBogor-2009	108.449.608.948,00	763.644.496.002,00	<b>0,14</b>
_KotaBogor-2010	165.939.883.691,00	944.550.304.942,00	<b>0,18</b>
_KotaBogor-2011	132.952.958.038,00	1.074.576.515.295,00	<b>0,12</b>
_KotaBogor-2012	222.276.037.760,00	1.255.350.899.491,00	<b>0,18</b>
_KotaBogor-2013	224.308.059.020,00	1.421.277.460.779,00	<b>0,16</b>
_KotaSukabumi-2009	120.425.791.731,00	557.821.530.539,00	<b>0,22</b>
_KotaSukabumi-2010	50.596.285.951,00	568.645.336.614,00	<b>0,09</b>
_KotaSukabumi-2011	56.290.977.928,00	624.504.433.475,00	<b>0,09</b>
_KotaSukabumi-2012	61.371.774.294,00	714.435.605.830,00	<b>0,09</b>
_KotaSukabumi-2013	115.523.193.175,00	838.405.936.902,00	<b>0,14</b>
_KotaBandung-2009	398.988.385.073,04	2.248.740.072.151,04	<b>0,18</b>
_KotaBandung-2010	445.095.482.843,00	2.562.076.816.553,00	<b>0,17</b>
_KotaBandung-2011	612.081.890.549,00	3.080.347.679.003,00	<b>0,20</b>
_KotaBandung-2012	806.665.039.823,00	3.490.035.513.075,00	<b>0,23</b>
_KotaBandung-2013	1.064.845.440.308,00	4.027.469.180.321,00	<b>0,26</b>
_KotaCirebon-2009	92.024.817.541,00	620.625.958.024,00	<b>0,15</b>
_KotaCirebon-2010	140.365.711.137,00	749.767.900.000,00	<b>0,19</b>
_KotaCirebon-2011	140.011.150.645,00	818.299.128.015,00	<b>0,17</b>
_KotaCirebon-2012	93.925.244.322,00	813.671.539.785,00	<b>0,12</b>
_KotaCirebon-2013	169.462.451.965,00	975.249.676.763,00	<b>0,17</b>
_KotaBekasi-2009	342.503.050.627,00	1.501.555.212.793,00	<b>0,23</b>
_KotaBekasi-2010	275.320.950.557,00	1.593.446.958.195,00	<b>0,17</b>

Obs	BM	TB	Rasio BM
_Kota Bekasi-2011	323.903.765.551,00	1.981.344.801.647,00	<b>0,16</b>
_Kota Bekasi-2012	737.186.202.358,00	2.499.559.813.954,00	<b>0,29</b>
_Kota Bekasi-2013	888.422.432.910,00	2.959.889.954.879,00	<b>0,30</b>
_Kota Depok-2009	239.253.505.474,00	955.814.987.725,00	<b>0,25</b>
_Kota Depok-2010	219.717.984.878,00	1.088.629.034.046,00	<b>0,20</b>
_Kota Depok-2011	295.461.326.149,00	1.350.085.338.873,01	<b>0,22</b>
_Kota Depok-2012	329.846.075.583,00	1.371.444.184.912,00	<b>0,24</b>
_Kota Depok-2013	655.386.101.838,00	1.883.224.062.227,00	<b>0,35</b>
_Kota Cima hi-2009	95.247.306.050,00	541.071.977.202,00	<b>0,18</b>
_Kota Cima hi-2010	91.135.651.185,00	636.201.144.912,00	<b>0,14</b>
_Kota Cima hi-2011	102.870.918.842,00	738.303.631.328,00	<b>0,14</b>
_Kota Cima hi-2012	111.845.037.202,00	833.411.677.047,00	<b>0,13</b>
_Kota Cima hi-2013	120.732.964.467,00	922.343.621.547,00	<b>0,13</b>
_Kota Tasikmalaya-2009	118.847.625.133,00	687.947.280.646,00	<b>0,17</b>
_Kota Tasikmalaya-2010	124.138.673.096,00	880.339.919.311,91	<b>0,14</b>
_Kota Tasikmalaya-2011	104.450.591.142,00	917.531.043.950,00	<b>0,11</b>
_Kota Tasikmalaya-2012	126.531.362.161,00	1.035.028.120.491,00	<b>0,12</b>
_Kota Tasikmalaya-2013	261.383.222.345,00	1.311.030.641.333,00	<b>0,20</b>
_Kota Banjar-2009	104.072.768.842,00	393.508.151.570,73	<b>0,26</b>
_Kota Banjar-2010	62.265.981.163,00	361.961.507.137,00	<b>0,17</b>
_Kota Banjar-2011	151.418.340.703,00	484.464.252.840,00	<b>0,31</b>
_Kota Banjar-2012	148.623.923.071,00	513.257.046.492,00	<b>0,29</b>
_Kota Banjar-2013	221.351.044.402,00	646.330.710.092,00	<b>0,34</b>

## LAMPIRAN 2

### Tingkat Kemandirian

Obs	PAD	Total Pendapatan	KM
KabBogor-2009	337.903.884.329,00	2.178.137.511.638,00	<b>0,16</b>
KabBogor-2010	399.263.956.504,00	2.511.474.972.404,00	<b>0,16</b>
KabBogor-2011	685.121.399.928,00	3.451.755.115.305,00	<b>0,20</b>
KabBogor-2012	1.048.230.704.202,00	3.954.087.603.118,00	<b>0,27</b>
KabBogor-2013	1.261.034.564.121,00	4.572.391.999.814,00	<b>0,28</b>
KabSukabumi-2009	80.616.078.322,80	1.432.336.419.645,80	<b>0,06</b>
KabSukabumi-2010	98.442.632.628,00	1.519.735.050.963,00	<b>0,06</b>
KabSukabumi-2011	151.825.718.336,01	1.856.087.255.070,01	<b>0,08</b>
KabSukabumi-2012	185.190.545.988,00	2.033.421.618.055,00	<b>0,09</b>
KabSukabumi-2013	273.452.383.010,66	2.408.355.096.102,00	<b>0,11</b>
KabCianjur-2009	93.628.876.481,48	1.323.092.886.215,48	<b>0,07</b>
KabCianjur-2010	114.305.535.968,00	1.475.100.100.133,00	<b>0,08</b>
KabCianjur-2011	147.346.021.050,00	1.771.273.333.446,00	<b>0,08</b>
KabCianjur-2012	215.802.558.713,00	2.035.530.861.314,00	<b>0,11</b>
KabCianjur-2013	266.100.616.612,00	2.247.859.248.345,00	<b>0,12</b>
KabBandung-2009	153.271.649.974,00	1.955.142.904.011,00	<b>0,08</b>
KabBandung-2010	198.650.518.839,00	2.042.977.659.292,00	<b>0,10</b>
KabBandung-2011	291.062.396.559,70	2.453.398.748.635,70	<b>0,12</b>
KabBandung-2012	366.316.690.578,00	2.902.414.601.182,00	<b>0,13</b>
KabBandung-2013	507.243.684.130,50	3.368.043.981.175,50	<b>0,15</b>
KabGarut-2009	102.702.673.665,00	1.594.689.277.464,00	<b>0,06</b>
KabGarut-2010	108.914.763.969,00	1.695.066.200.909,00	<b>0,06</b>
KabGarut-2011	122.418.643.665,00	2.066.858.426.039,00	<b>0,06</b>
KabGarut-2012	184.269.764.772,00	2.329.795.383.220,00	<b>0,08</b>
KabGarut-2013	240.631.630.078,00	2.741.528.022.330,00	<b>0,09</b>
KabTasikmalaya-2009	76.505.801.570,00	709.021.729.993,00	<b>0,11</b>
KabTasikmalaya-2010	48.338.061.521,00	1.309.528.239.959,00	<b>0,04</b>
KabTasikmalaya-2011	51.160.921.192,00	1.505.485.957.229,00	<b>0,03</b>
KabTasikmalaya-2012	60.970.810.517,00	1.813.389.750.992,00	<b>0,03</b>
KabTasikmalaya-2013	70.474.192.115,00	2.213.623.318.967,00	<b>0,03</b>
KabCiamis-2009	51.276.555.046,00	1.347.606.475.292,00	<b>0,04</b>
KabCiamis-2010	50.512.875.943,00	1.318.623.298.748,00	<b>0,04</b>
KabCiamis-2011	58.900.535.511,00	1.599.795.624.968,00	<b>0,04</b>
KabCiamis-2012	87.711.885.423,00	1.867.335.578.125,00	<b>0,05</b>
KabCiamis-2013	117.475.935.245,00	2.196.493.936.848,00	<b>0,05</b>
KabKuningan-2009	63.573.538.311,00	950.664.908.800,00	<b>0,07</b>
KabKuningan-2010	68.158.790.368,00	1.115.998.483.715,00	<b>0,06</b>
KabKuningan-2011	82.917.043.803,00	1.309.561.863.969,00	<b>0,06</b>

KabKuningan-2011	82.917.043.803,00	1.309.561.863.969,00	<b>0,06</b>
KabKuningan-2012	97.605.695.930,00	1.483.418.859.835,00	<b>0,07</b>
KabKuningan-2013	112.517.242.678,00	1.625.738.990.778,00	<b>0,07</b>
KabCirebon-2009	77.318.391.813,28	637.259.937.077,28	<b>0,12</b>
KabCirebon-2010	90.795.674.571,00	677.729.110.504,00	<b>0,13</b>
KabCirebon-2011	193.843.221.050,00	1.781.243.088.712,00	<b>0,11</b>
KabCirebon-2012	229.992.688.230,00	1.994.265.312.708,00	<b>0,12</b>
KabCirebon-2013	250.848.893.157,00	2.316.011.665.105,00	<b>0,11</b>
KabMajalengka-2009	68.907.543.309,00	967.266.988.296,00	<b>0,07</b>
KabMajalengka-2010	76.398.018.123,00	1.122.795.910.289,00	<b>0,07</b>
KabMajalengka-2011	86.579.536.411,00	1.277.921.523.925,00	<b>0,07</b>
KabMajalengka-2012	103.740.974.491,00	1.574.352.386.820,00	<b>0,07</b>
KabMajalengka-2013	142.505.677.495,00	1.791.764.985.114,00	<b>0,08</b>
KabSumedang-2009	104.172.660.220,71	968.709.285.084,71	<b>0,11</b>
KabSumedang-2010	108.646.803.911,20	1.086.557.300.142,20	<b>0,10</b>
KabSumedang-2011	139.823.277.566,34	1.349.199.014.838,34	<b>0,10</b>
KabSumedang-2012	161.995.577.347,89	1.494.452.792.261,89	<b>0,11</b>
KabSumedang-2013	189.612.071.919,53	1.715.190.458.848,53	<b>0,11</b>
KabIndramayu-2009	86.408.586.763,33	1.206.349.249.530,33	<b>0,07</b>
KabIndramayu-2010	101.840.184.225,58	1.375.172.959.304,58	<b>0,07</b>
KabIndramayu-2011	144.553.894.178,00	1.672.637.775.550,00	<b>0,09</b>
KabIndramayu-2012	164.671.614.661,00	1.885.653.941.609,00	<b>0,09</b>
KabIndramayu-2013	174.713.000.374,00	2.121.305.065.714,00	<b>0,08</b>
KabSubang-2009	67.665.304.446,00	1.112.812.439.717,00	<b>0,06</b>
KabSubang-2010	75.532.291.693,00	1.186.278.289.469,00	<b>0,06</b>
KabSubang-2011	94.181.846.520,00	1.405.974.623.364,00	<b>0,07</b>
KabSubang-2012	120.972.034.723,00	1.566.137.077.396,00	<b>0,08</b>
KabSubang-2013	143.314.398.091,00	1.815.830.744.298,00	<b>0,08</b>
KabPurwakarta-2009	64.044.768.371,00	782.025.969.792,00	<b>0,08</b>
KabPurwakarta-2010	76.489.287.145,00	848.949.139.000,00	<b>0,09</b>
KabPurwakarta-2011	111.690.657.181,00	995.695.195.966,00	<b>0,11</b>
KabPurwakarta-2012	151.567.981.246,00	1.156.857.542.925,00	<b>0,13</b>
KabPurwakarta-2013	173.764.159.823,00	1.371.139.969.587,00	<b>0,13</b>
KabKarawang-2009	135.599.465.640,00	1.357.708.464.009,00	<b>0,10</b>
KabKarawang-2010	210.282.788.665,00	1.622.759.874.491,00	<b>0,13</b>
KabKarawang-2011	378.630.051.818,00	2.022.376.611.223,00	<b>0,19</b>
KabKarawang-2012	658.597.372.181,00	2.461.055.535.050,00	<b>0,27</b>
KabKarawang-2013	660.841.119.625,00	2.691.829.177.177,00	<b>0,25</b>
KabBekasi-2009	287.299.507.395,00	1.623.653.309.514,00	<b>0,18</b>
KabBekasi-2010	258.671.098.123,00	1.735.259.432.745,00	<b>0,15</b>
KabBekasi-2011	599.070.130.849,00	2.363.250.553.528,00	<b>0,25</b>
KabBekasi-2012	801.852.905.867,00	2.788.775.364.932,00	<b>0,29</b>

KabBekasi-2009	287.299.507.395,00	1.623.653.309.514,00	<b>0,18</b>
KabBekasi-2010	258.671.098.123,00	1.735.259.432.745,00	<b>0,15</b>
KabBekasi-2011	599.070.130.849,00	2.363.250.553.528,00	<b>0,25</b>
KabBekasi-2012	801.852.905.867,00	2.788.775.364.932,00	<b>0,29</b>
KabBekasi-2013	1.154.525.309.151,00	3.363.441.159.067,00	<b>0,34</b>
KabBandungBarat-2009	39.964.363.945,00	864.827.868.047,00	<b>0,05</b>
KabBandungBarat-2010	51.362.353.753,00	1.025.448.932.324,00	<b>0,05</b>
KabBandungBarat-2011	94.606.269.067,00	1.278.984.499.910,00	<b>0,07</b>
KabBandungBarat-2012	136.241.257.300,00	1.423.861.213.678,00	<b>0,10</b>
KabBandungBarat-2013	187.170.467.143,05	1.671.362.339.915,05	<b>0,11</b>
Kota Bogor-2009	115.921.660.827,00	828.024.788.957,00	<b>0,14</b>
Kota Bogor-2010	127.488.089.831,00	892.199.445.365,00	<b>0,14</b>
Kota Bogor-2011	230.449.644.620,00	1.141.638.163.971,00	<b>0,20</b>
Kota Bogor-2012	300.932.470.210,00	1.356.529.980.355,00	<b>0,22</b>
Kota Bogor-2013	464.695.880.485,00	1.574.372.008.958,00	<b>0,30</b>
Kota Sukabumi-2009	66.190.680.359,00	506.568.226.729,00	<b>0,13</b>
Kota Sukabumi-2010	91.472.357.185,00	565.149.868.771,00	<b>0,16</b>
Kota Sukabumi-2011	115.473.386.833,00	631.323.058.313,00	<b>0,18</b>
Kota Sukabumi-2012	148.387.565.338,00	732.513.653.312,00	<b>0,20</b>
Kota Sukabumi-2013	175.539.319.476,00	844.635.562.884,00	<b>0,21</b>
Kota Bandung-2009	360.152.627.690,00	2.402.466.979.725,00	<b>0,15</b>
Kota Bandung-2010	441.863.068.294,00	2.440.160.360.714,00	<b>0,18</b>
Kota Bandung-2011	833.254.175.288,00	3.115.296.523.905,00	<b>0,27</b>
Kota Bandung-2012	1.005.583.424.429,00	3.666.693.409.600,00	<b>0,27</b>
Kota Bandung-2013	1.442.775.238.323,00	4.332.088.946.776,00	<b>0,33</b>
Kota Cirebon-2009	77.318.391.813,28	637.259.937.077,28	<b>0,12</b>
Kota Cirebon-2010	90.795.674.571,00	677.729.110.504,00	<b>0,13</b>
Kota Cirebon-2011	120.130.531.059,00	838.617.783.414,00	<b>0,14</b>
Kota Cirebon-2012	149.489.858.160,00	872.125.300.174,00	<b>0,17</b>
Kota Cirebon-2013	206.019.069.726,00	1.009.950.399.239,00	<b>0,20</b>
Kota Bekasi-2009	235.407.322.898,80	1.480.482.397.875,80	<b>0,16</b>
Kota Bekasi-2010	296.046.878.711,90	1.582.441.084.726,90	<b>0,19</b>
Kota Bekasi-2011	568.344.298.997,36	2.220.351.556.783,36	<b>0,26</b>
Kota Bekasi-2012	730.735.134.154,00	2.678.890.729.809,00	<b>0,27</b>
Kota Bekasi-2013	969.741.298.062,21	2.962.609.186.288,21	<b>0,33</b>
Kota Depok-2009	115.720.347.455,90	991.862.300.690,88	<b>0,12</b>
Kota Depok-2010	142.380.788.621,00	1.111.708.060.137,00	<b>0,13</b>
Kota Depok-2011	282.747.544.886,76	1.329.137.909.464,76	<b>0,21</b>
Kota Depok-2012	474.705.361.540,18	1.634.893.022.148,18	<b>0,29</b>
Kota Depok-2013	581.207.570.935,26	1.921.402.778.745,26	<b>0,30</b>
Kota Cimahi-2009	75.037.372.353,00	592.055.088.602,00	<b>0,13</b>
Kota Cimahi-2010	87.321.279.805,00	619.489.083.478,00	<b>0,14</b>
Kota Cimahi-2011	116.677.729.307,61	721.746.717.931,61	<b>0,16</b>
Kota Cimahi-2012	144.540.602.338,00	872.552.563.936,00	<b>0,17</b>
Kota Cimahi-2013	191.599.456.904,09	975.350.197.043,09	<b>0,20</b>
Kota Tasikmalaya-2009	76.505.801.570,00	709.021.729.993,00	<b>0,11</b>
Kota Tasikmalaya-2010	104.787.914.974,70	829.347.403.378,70	<b>0,13</b>

_Kota Cimahi-2010	87.321.279.805,00	619.489.083.478,00	<b>0,14</b>
_Kota Cimahi-2011	116.677.729.307,61	721.746.717.931,61	<b>0,16</b>
_Kota Cimahi-2012	144.540.602.338,00	872.552.563.936,00	<b>0,17</b>
_Kota Cimahi-2013	191.599.456.904,09	975.350.197.043,09	<b>0,20</b>
_Kota Tasikmalaya-2009	76.505.801.570,00	709.021.729.993,00	<b>0,11</b>
_Kota Tasikmalaya-2010	104.787.914.974,70	829.347.403.378,70	<b>0,13</b>
_Kota Tasikmalaya-2011	110.369.865.905,03	915.696.936.770,03	<b>0,12</b>
_Kota Tasikmalaya-2012	153.009.410.135,00	1.061.433.837.805,00	<b>0,14</b>
_Kota Tasikmalaya-2013	172.883.279.898,06	1.365.593.492.674,06	<b>0,13</b>
_Kota Banjar-2009	25.849.341.608,85	360.168.980.156,85	<b>0,07</b>
_Kota Banjar-2010	37.358.705.002,00	384.139.244.220,00	<b>0,10</b>
_Kota Banjar-2011	45.952.391.987,00	489.435.484.182,00	<b>0,09</b>
_Kota Banjar-2012	54.684.690.641,00	490.400.619.133,00	<b>0,11</b>
_Kota Banjar-2013	70.625.135.392,00	620.917.335.500,00	<b>0,11</b>

## LAMPIRAN 3

## TINGKAT PEMBIAYAAN SILPA

obs	SILPA	TB	SILPA
_KabBogor-2009	432.306.689.949,00	2.179.663.902.055,00	0,20
_KabBogor-2010	402.208.954.665,00	2.603.523.610.284,00	0,15
_KabBogor-2011	261.335.954.857,00	3.207.105.283.274,00	0,08
_KabBogor-2012	478.705.360.424,00	3.622.074.197.808,00	0,13
_KabBogor-2013	700.208.345.854,00	4.531.985.614.318,00	0,15
_KabSukabumi-2009	75.674.418.828,00	1.267.699.589.183,80	0,06
_KabSukabumi-2010	230.781.364.518,00	1.615.098.489.079,00	0,14
_KabSukabumi-2011	127.505.633.580,00	1.837.861.324.937,80	0,07
_KabSukabumi-2012	127.778.909.333,21	1.984.308.232.949,00	0,06
_KabSukabumi-2013	158.191.457.558,21	2.419.989.128.345,00	0,07
_KabCianjur-2009	79.130.702.708,00	1.238.530.233.344,48	0,06
_KabCianjur-2010	105.773.954.868,00	1.433.276.658.278,71	0,07
_KabCianjur-2011	121.391.827.438,29	1.776.907.558.536,00	0,07
_KabCianjur-2012	101.880.869.997,24	1.972.485.430.338,88	0,05
_KabCianjur-2013	152.943.247.712,00	2.152.007.359.077,14	0,07
_KabBandung-2009	159.509.599.178,14	1.746.674.817.198,38	0,09
_KabBandung-2010	317.829.399.787,70	2.073.603.127.840,00	0,15
_KabBandung-2011	258.190.830.139,06	2.428.383.916.449,00	0,11
_KabBandung-2012	288.707.585.817,76	2.788.973.075.378,00	0,10
_KabBandung-2013	308.234.711.842,76	3.162.356.298.270,50	0,10
_KabGarut-2009	7.632.213.771,00	1.414.967.696.404,00	0,01
_KabGarut-2010	121.121.145.254,00	1.689.071.148.835,00	0,07
_KabGarut-2011	115.051.213.515,00	2.011.157.111.530,00	0,06
_KabGarut-2012	158.046.302.754,00	2.131.939.922.010,00	0,07
_KabGarut-2013	333.029.342.282,00	2.934.042.970.927,00	0,11
_KabTasikmalaya-2009	154.150.286.185,00	687.947.280.646,00	0,22
_KabTasikmalaya-2010	135.369.499.951,00	1.356.159.391.203,00	0,10
_KabTasikmalaya-2011	110.696.616.756,00	1.501.367.333.471,00	0,07
_KabTasikmalaya-2012	111.163.136.360,00	1.820.803.137.277,00	0,06
_KabTasikmalaya-2013	97.845.678.382,00	2.155.866.635.930,00	0,05
_KabCiamis-2009	25.386.679.218,00	1.200.925.783.825,00	0,02
_KabCiamis-2010	163.161.596.832,00	1.380.941.032.459,00	0,12
_KabCiamis-2011	92.679.416.701,00	1.622.254.043.765,00	0,06
_KabCiamis-2012	60.261.399.594,00	1.760.358.019.447,00	0,03
_KabCiamis-2013	144.175.496.317,00	2.179.423.542.651,00	0,07
_KabKuningan-2009	2.986.095.110,00	854.737.145.987,00	0,00
_KabKuningan-2010	65.265.544.644,00	1.094.351.959.688,00	0,06
_KabKuningan-2011	47.838.522.326,00	1.247.379.255.668,00	0,04
_KabKuningan-2012	42.909.970.692,00	1.393.538.700.959,00	0,03
_KabKuningan-2013	59.874.785.019,00	1.576.541.981.019,00	0,04
_KabCirebon-2009	22.860.412.021,00	620.625.958.024,00	0,04
_KabCirebon-2010	98.953.978.865,00	749.767.900.000,00	0,13

Kab Cirebon-2009	22.860.412.021,00	620.625.958.024,00	0,04
Kab Cirebon-2010	98.953.978.865,00	749.767.900.000,00	0,13
Kab Cirebon-2011	90.263.529.884,00	1.683.613.428.435,00	0,05
Kab Cirebon-2012	113.000.225.777,00	1.967.149.727.443,00	0,06
Kab Cirebon-2013	64.013.718.926,00	2.256.876.527.139,00	0,03
Kab Majalengka-2009	27.685.213.599,00	883.460.228.083,00	0,03
Kab Majalengka-2010	64.847.598.099,00	1.134.530.896.200,00	0,06
Kab Majalengka-2011	52.075.316.209,00	1.287.193.140.716,00	0,04
Kab Majalengka-2012	36.852.782.367,00	1.525.083.235.032,00	0,02
Kab Majalengka-2013	67.749.529.599,00	1.726.776.332.879,00	0,04
Kab Sumedang-2009	24.038.432.561,38	951.660.808.625,00	0,03
Kab Sumedang-2010	63.787.091.618,09	1.120.252.427.611,00	0,06
Kab Sumedang-2011	22.468.006.735,29	1.241.804.252.689,00	0,02
Kab Sumedang-2012	84.966.348.318,63	1.424.520.294.893,00	0,06
Kab Sumedang-2013	97.947.021.572,52	1.640.920.557.120,00	0,06
Kab Indramayu-2009	44.960.727.046,67	1.183.418.335.797,00	0,04
Kab Indramayu-2010	80.699.042.747,00	1.299.806.918.501,00	0,06
Kab Indramayu-2011	104.869.861.686,58	1.570.672.759.338,00	0,07
Kab Indramayu-2012	195.472.406.764,00	1.842.450.693.026,00	0,11
Kab Indramayu-2013	196.588.562.806,00	2.119.997.907.136,00	0,09
Kab Subang-2009	15.968.462.381,00	1.074.026.971.330,00	0,01
Kab Subang-2010	57.607.654.353,00	1.239.355.076.029,00	0,05
Kab Subang-2011	3.710.867.793,00	1.351.795.557.956,00	0,00
Kab Subang-2012	54.112.658.349,00	1.481.609.290.807,00	0,04
Kab Subang-2013	135.341.979.938,00	1.778.350.906.250,00	0,08
Kab Purwakarta-2009	39.183.657.324,00	722.124.353.006,00	0,05
Kab Purwakarta-2010	72.988.064.110,00	862.876.316.666,00	0,08
Kab Purwakarta-2011	30.368.692.819,00	962.771.230.654,00	0,03
Kab Purwakarta-2012	29.466.864.977,00	1.114.438.309.602,00	0,03
Kab Purwakarta-2013	43.511.237.674,00	1.354.385.032.662,00	0,03
Kab Karawang-2009	168.235.548.763,00	1.243.238.534.751,00	0,14
Kab Karawang-2010	246.689.472.038,00	1.522.989.245.712,00	0,16
Kab Karawang-2011	307.064.861.407,00	1.832.297.832.169,00	0,17
Kab Karawang-2012	455.319.061.274,00	2.382.740.922.128,00	0,19
Kab Karawang-2013	500.169.420.146,00	2.719.098.263.802,00	0,18
Kab Bekasi-2009	773.808.017.061,00	1.895.092.358.697,00	0,41
Kab Bekasi-2010	478.992.551.878,00	1.682.031.523.500,00	0,28
Kab Bekasi-2011	498.569.471.123,00	2.295.728.180.761,00	0,22
Kab Bekasi-2012	538.187.766.890,00	2.600.798.894.300,00	0,21
Kab Bekasi-2013	661.362.690.607,00	3.196.402.212.818,00	0,21
Kab Bandung Barat-2009	130.975.009.138,00	760.546.528.891,00	0,17

_KabBandungBarat-2010	213.020.429.483,00	987.754.548.838,00	0,22
_KabBandungBarat-2011	227.198.355.148,00	1.251.596.015.396,00	0,18
_KabBandungBarat-2012	239.586.839.662,00	1.501.192.558.392,00	0,16
_KabBandungBarat-2013	152.255.494.948,00	1.680.101.451.150,05	0,09
_Kota Bogor-2009	132.416.563.328,00	763.644.496.002,00	0,17
_Kota Bogor-2010	154.938.553.017,00	944.550.304.942,00	0,16
_Kota Bogor-2011	97.655.357.440,00	1.074.576.515.295,00	0,09
_Kota Bogor-2012	137.839.305.116,00	1.255.350.899.491,00	0,11
_Kota Bogor-2013	167.060.005.481,00	1.421.277.460.779,00	0,12
_Kota Sukabumi-2009	46.673.099.281,00	557.821.530.539,00	0,08
_Kota Sukabumi-2010	20.499.812.122,00	568.645.336.614,00	0,04
_Kota Sukabumi-2011	15.731.425.396,00	624.504.433.475,00	0,03
_Kota Sukabumi-2012	19.225.405.409,00	714.435.605.830,00	0,03
_Kota Sukabumi-2013	34.255.844.625,00	838.405.936.902,00	0,04
_Kota Bandung-2009	259.655.659.156,00	2.248.740.072.151,04	0,12
_Kota Bandung-2010	372.498.672.418,00	2.562.076.816.553,00	0,15
_Kota Bandung-2011	276.445.180.269,00	3.080.347.679.003,00	0,09
_Kota Bandung-2012	293.759.835.532,00	3.490.035.513.075,00	0,08
_Kota Bandung-2013	432.448.611.338,00	4.027.469.180.321,00	0,11
_Kota Cirebon-2009	75.458.581.459,00	620.625.958.024,00	0,12
_Kota Cirebon-2010	88.985.593.242,28	749.767.900.000,00	0,12
_Kota Cirebon-2011	19.948.530.499,00	818.299.128.015,00	0,02
_Kota Cirebon-2012	32.578.400.345,00	813.671.539.785,00	0,04
_Kota Cirebon-2013	87.467.673.709,00	975.249.676.763,00	0,09
_Kota Bekasi-2009	146.250.854.643,55	1.501.555.212.793,00	0,10
_Kota Bekasi-2010	109.822.099.008,35	1.593.446.958.195,00	0,07
_Kota Bekasi-2011	86.713.956.124,25	1.981.344.801.647,00	0,04
_Kota Bekasi-2012	278.625.024.958,61	2.499.559.813.954,00	0,11
_Kota Bekasi-2013	429.185.663.081,61	2.959.889.954.879,00	0,15
_Kota Depok-2009	189.511.116.405,92	955.814.987.725,00	0,20
_Kota Depok-2010	225.973.099.066,82	1.088.629.034.046,00	0,21
_Kota Depok-2011	244.764.288.165,82	1.350.085.338.873,01	0,18
_Kota Depok-2012	258.482.862.299,58	1.371.444.184.912,00	0,19
_Kota Depok-2013	564.712.376.329,76	1.883.224.062.227,00	0,30
_Kota Cimahi-2009	70.347.453.624,24	541.071.977.202,00	0,13
_Kota Cimahi-2010	118.842.785.811,24	636.201.144.912,00	0,19
_Kota Cimahi-2011	96.893.646.067,00	738.303.631.328,00	0,13
_Kota Cimahi-2012	71.258.312.521,22	833.411.677.047,00	0,09
_Kota Cimahi-2013	108.195.022.763,22	922.343.621.547,00	0,12

_Kota Tasi kma laya -2009	76.505.801.570,00	709.021.729.993,00	0,11
_Kota Tasi kma laya -2010	104.787.914.974,70	829.347.403.378,70	0,13
_Kota Tasi kma laya -2011	110.369.865.905,03	915.696.936.770,03	0,12
_Kota Tasi kma laya -2012	153.009.410.135,00	1.061.433.837.805,00	0,14
_Kota Tasi kma laya -2013	172.883.279.898,06	1.365.593.492.674,06	0,13
_Kota Ban jar-2009	25.849.341.608,85	360.168.980.156,85	0,07
_Kota Ban jar-2010	37.358.705.002,00	384.139.244.220,00	0,10
_Kota Ban jar-2011	45.952.391.987,00	489.435.484.182,00	0,09
_Kota Ban jar-2012	54.684.690.641,00	490.400.619.133,00	0,11
_Kota Ban jar-2013	70.625.135.392,00	620.917.335.500,00	0,11

LAMPIRAN 4

RUANG FISKAL

obs	RUANG FISKAL	TOTAL PENDAPATAN	DAK	OTSUS	DARURAT	HIBAH	B PEGAWAI	B BUNGA	RF
_KabBogor-2009	1.099.066.135.378	2.178.137.511.638	61.469.000.000				1.017.602.376.260		0,50
_KabBogor-2010	1.168.956.203.473	2.511.474.972.404	143.081.300.000	7.936.200.000		2.999.965.000	1.188.501.303.931		0,47
_KabBogor-2011	1.524.966.676.650	3.451.755.115.305	159.725.600.000	318.014.644.000		17.499.965.000	1.431.548.229.655		0,44
_KabBogor-2012	2.164.739.647.394	3.954.087.603.118	158.027.770.000			4.099.850.000	1.627.220.335.724		0,55
_KabBogor-2013	2.187.912.231.355	4.572.391.999.814	216.694.720.000	356.458.862.000		2.273.371.355	1.809.052.815.104		0,48
_KabSukabumi-2	581.720.663.852	1.432.336.419.646	105.026.000.000	2.000.000.000			743.589.755.794		0,41
_KabSukabumi-2	401.084.444.977	1.519.735.050.963	95.938.500.000	89.774.362.000			932.937.743.986		0,26
_KabSukabumi-2	386.068.546.456	1.856.087.255.070	115.466.900.000	307.938.491.560			1.046.613.317.054		0,21
_KabSukabumi-2	580.911.568.865	2.033.421.618.055	128.266.790.000	190.464.509.000		292.522.000	1.133.486.228.190		0,29
_KabSukabumi-2	690.692.729.127	2.408.355.096.102	164.084.320.000	282.344.041.000		667.791.364	1.270.566.214.611		0,29
_KabCianjur-20	399.054.951.816	1.323.092.886.215	101.257.000.000	28.353.399.479		121.405.685.000	668.698.080.431	4.323.769.489	0,30
_KabCianjur-20	319.823.437.793	1.475.100.100.133	101.270.400.000	122.852.177.702		114.667.790.400	814.854.657.517	1.631.636.721	0,22
_KabCianjur-20	277.338.015.059	1.771.273.333.446	100.085.500.000	316.907.351.540		82.635.955.030	994.306.511.817		0,16
_KabCianjur-20	476.654.435.130	2.035.530.861.314	148.885.720.000	221.006.291.000		91.070.462.610	1.097.913.952.574		0,23
_KabCianjur-20	598.060.078.060	2.247.859.248.345	97.513.400.000	298.168.442.500		71.222.762.285	1.182.894.565.500		0,27
_KabBandung-2	824.404.779.045	1.955.142.904.011	30.627.934.000	53.130.359.000	44.266.548.000		1.002.713.283.966		0,42
_KabBandung-2	558.455.253.885	2.042.977.659.292	118.903.700.000	172.051.700.400			1.193.567.005.007		0,27
_KabBandung-2	409.969.862.136	2.453.398.748.636	100.036.300.000	445.459.218.440			1.497.933.368.060		0,17
_KabBandung-2	774.753.751.993	2.902.414.601.182	167.510.030.000	318.054.232.000			1.642.096.587.189		0,27
_KabBandung-2	943.729.568.161	3.368.043.981.176	159.094.010.000	428.493.318.000		1.490.141.040	1.835.236.943.975		0,28
_KabGarut-2009	195.605.484.124	1.594.689.277.464	102.035.000.000	333.569.775.000	28.802.040.000		934.676.978.340		0,12
_KabGarut-2010	349.377.298.372	1.695.066.200.909	119.553.000.000	132.053.853.600		4.100.000.000	1.089.982.048.937		0,21
_KabGarut-2011	287.228.081.068	2.066.858.426.039	114.331.400.000	386.701.374.080		6.450.000.000	1.272.147.570.891		0,14
_KabGarut-2012	489.285.814.559	2.329.795.383.220	142.605.490.000	266.801.526.000			1.431.102.552.661		0,21
_KabGarut-2013	464.844.260.346	2.741.528.022.330	179.732.880.000	422.627.249.500		2.000.000.000	1.672.323.632.484		0,17
_KabTasikmalay	240.551.250.150	709.021.729.993	40.445.000.000	19.717.409.300			408.308.070.543		0,34
_KabTasikmalay	358.619.286.872	1.309.528.239.959	60.545.500.000	28.523.685.094			861.839.767.993		0,27
_KabTasikmalay	166.562.266.180	1.505.485.957.229	76.857.600.000	266.978.513.160		148.363.496	994.939.214.393		0,11
_KabTasikmalay	341.240.831.051	1.813.389.750.992	106.110.250.000	232.477.213.000			1.133.561.456.941		0,19
_KabTasikmalay	513.556.097.773	2.213.623.318.967	98.997.370.000	340.098.291.000			1.260.971.560.194		0,23
_KabCiamis-200	374.905.817.181	1.347.606.475.292	104.123.000.000	32.939.400.000		62.319.688.000	773.149.109.173	169.460.938	0,28
_KabCiamis-201	206.645.234.094	1.318.623.298.748	92.253.900.000	123.118.118.400		1.000.000.000	895.023.910.390	582.135.864	0,16
_KabCiamis-201	140.275.721.942	1.599.795.624.968	85.246.000.000	269.880.250.440		2.500.000.000	1.101.893.652.586		0,09
_KabCiamis-201	327.186.386.556	1.867.335.578.125	89.651.290.000	247.286.806.000			1.203.211.095.569		0,18
_KabCiamis-201	376.193.331.160	2.196.493.936.848	95.612.680.000	360.372.972.000		1.446.000.000	1.362.868.953.688		0,17
_KabKuningan-2	271.175.625.649	950.664.908.800	39.313.000.000	19.504.402.000	469.112.000		620.196.365.811	6.403.340	0,29
_KabKuningan-2	182.264.025.595	1.115.998.483.715	77.738.300.000	100.854.182.476		3.500.000.000	751.641.975.644		0,16

_KabCiamis-2	327.186.386.556	1.867.335.578.125	89.651.290.000	247.286.806.000			1.203.211.095.569		0,18
_KabCiamis-2	376.193.331.160	2.196.493.936.848	95.612.680.000	360.372.972.000		1.446.000.000	1.362.868.953.688		0,17
_KabKuningan	271.175.625.649	950.664.908.800	39.313.000.000	19.504.402.000	469.112.000		620.196.365.811	6.403.340	0,29
_KabKuningan	182.264.025.595	1.115.998.483.715	77.738.300.000	100.854.182.476		3.500.000.000	751.641.975.644		0,16
_KabKuningan	176.302.937.060	1.309.561.863.969	69.418.900.000	206.603.248.400		10.950.000.000	846.286.778.509		0,13
_KabKuningan	308.372.161.596	1.483.418.859.835	68.155.840.000	147.805.926.000			959.084.932.239		0,21
_KabKuningan	243.788.695.532	1.625.738.990.778	62.124.640.000	228.370.480.000			1.091.455.175.246		0,15
_KabCirebon-2	274.968.997.021	637.259.937.077	33.873.000.000				328.417.940.056		0,43
_KabCirebon-2	304.383.570.448	677.729.110.504	19.634.900.000	25.292.700.000			392.676.168.176		0,45
_KabCirebon-2	359.438.459.535	1.781.243.088.712	76.614.800.000	283.483.387.080			1.061.706.442.097		0,20
_KabCirebon-2	421.580.471.337	1.994.265.312.708	86.034.470.000	294.676.765.000			1.191.973.606.371		0,21
_KabCirebon-2	557.483.347.481	2.316.011.665.105	97.245.530.000	291.023.324.000			1.370.259.463.624		0,24
_KabMajaleng	302.982.967.454	967.266.988.296	39.796.000.000	22.519.950.000			601.968.070.842		0,31
_KabMajaleng	242.569.500.913	1.122.795.910.289	68.323.500.000	68.309.966.729			743.592.942.647		0,22
_KabMajaleng	274.998.304.324	1.277.921.523.925	68.323.500.000	100.824.365.000			833.775.354.601		0,22
_KabMajaleng	497.200.936.140	1.574.352.386.820	129.748.250.000	12.195.000.000			935.208.200.680		0,32
_KabMajaleng	418.363.535.184	1.791.764.985.114	72.963.000.000	240.995.505.000			1.059.442.944.930		0,23
_KabSumedan	269.377.788.356	968.709.285.085	40.770.000.000	22.501.500.000			636.045.572.145	14.424.584	0,28
_KabSumedan	257.855.203.386	1.086.557.300.142	66.170.900.000	33.691.000.000			726.549.058.227	2.291.138.529	0,24
_KabSumedan	307.402.147.232	1.349.199.014.838	72.069.900.000	122.135.334.000			845.966.361.697	1.625.271.909	0,23
_KabSumedan	434.737.965.405	1.494.452.792.262	77.202.460.000	11.523.000.000			969.981.286.812	1.008.080.045	0,29
_KabSumedan	529.891.247.179	1.715.190.458.849	81.900.000.000	8.721.600.000			1.094.535.470.513	142.141.157	0,31
_KabIndramay	413.930.666.261	1.206.349.249.530	45.506.000.000	60.566.091.000			685.996.492.269	350.000.000	0,34
_KabIndramay	424.739.131.283	1.375.172.959.305	91.968.900.000	67.001.185.094			797.015.272.609	883.564.413	0,31
_KabIndramay	416.788.326.670	1.672.637.775.550	78.243.700.000	235.926.810.560			941.678.938.320		0,25
_KabIndramay	563.048.504.072	1.885.653.941.609	97.712.970.000	166.244.941.000			1.058.647.526.537		0,30
_KabIndramay	676.506.345.759	2.121.305.065.714	74.211.500.000	239.182.239.000			1.131.404.980.955		0,32
_KabSubang-2	398.628.610.985	1.112.812.439.717	81.438.000.000				632.745.828.732		0,36
_KabSubang-2	308.285.098.575	1.186.278.289.469	58.051.000.000			67.229.898.040	752.712.292.854		0,26
_KabSubang-2	457.408.027.748	1.405.974.623.364	52.428.600.000			53.137.603.172	843.000.392.444		0,33
_KabSubang-2	525.451.218.920	1.566.137.077.396	57.339.020.000			40.068.959.237	943.277.879.239		0,34

_KabSubang-20	447.955.178.671	1.815.830.744.298	59.497.100.000	240.271.954.000		2.073.135.378	1.066.033.376.249		<b>0,25</b>
_KabPurwakart	252.662.325.340	782.025.969.792	45.455.000.000	32.915.309.000			450.993.335.452		<b>0,32</b>
_KabPurwakart	227.343.728.382	848.949.139.000	50.558.600.000	34.209.200.000			536.837.610.618		<b>0,27</b>
_KabPurwakart	201.727.266.415	995.695.195.966	9.995.500.000	158.611.526.960			625.360.902.591		<b>0,20</b>
_KabPurwakart	51.755.051.740	1.156.857.542.925	44.084.300.000	113.145.574.000			947.872.617.185		<b>0,04</b>
_KabPurwakart	383.117.642.398	1.371.139.969.587	56.137.400.000	159.016.739.500		958.463.600	771.909.724.089		<b>0,28</b>
_KabKarawang	629.926.164.048	1.357.708.464.009	52.623.000.000	22.641.225.000			652.518.074.961		<b>0,46</b>
_KabKarawang	585.305.402.534	1.622.759.874.491	97.141.100.000	100.540.868.400	950.000.000	8.000.000.000	830.822.503.557		<b>0,36</b>
_KabKarawang	679.567.035.129	2.022.376.611.223	81.755.400.000	261.615.332.400		6.000.000.000	993.438.843.694		<b>0,34</b>
_KabKarawang	1.056.529.478.164	2.461.055.535.050	76.834.550.000	164.132.014.000		1.129.337.000	1.162.430.155.886		<b>0,43</b>
_KabKarawang	945.381.132.197	2.691.829.177.177	105.540.220.000	247.349.527.000		1.737.111.000	1.391.821.186.980		<b>0,35</b>
_KabBekasi-200	870.017.882.413	1.623.653.309.514	28.437.000.000	48.597.388.373			676.601.038.728		<b>0,54</b>
_KabBekasi-201	790.159.940.778	1.735.259.432.745	83.699.900.000	66.275.198.577		2.999.965.000	792.124.428.390		<b>0,46</b>
_KabBekasi-201	1.057.964.058.763	2.363.250.553.528	55.363.800.000	289.739.129.930		3.999.965.000	956.183.599.835		<b>0,45</b>
_KabBekasi-201	1.483.693.424.273	2.788.775.364.932	43.257.860.000	190.038.552.701		221.825.000	1.071.563.702.958		<b>0,53</b>
_KabBekasi-201	1.933.235.504.376	3.363.441.159.067	46.255.448.000	225.966.113.413		651.480.900	1.157.332.612.378		<b>0,57</b>
_KabBandungBa	399.536.676.910	864.827.868.047	19.130.000.000				446.161.191.137		<b>0,46</b>
_KabBandungBa	408.219.420.290	1.025.448.932.324	67.873.500.000				549.356.012.034		<b>0,40</b>
_KabBandungBa	331.563.113.830	1.278.984.499.910	62.602.900.000	207.201.613.380			677.616.872.700		<b>0,26</b>
_KabBandungBa	437.071.623.172	1.423.861.213.678	72.168.590.000	145.329.274.000			769.291.726.506		<b>0,31</b>
_KabBandungBa	527.450.061.800	1.671.362.339.915	64.682.770.000	211.735.512.000		1.564.553.999	865.929.442.116		<b>0,32</b>
_KotaBogor-200	394.657.806.665	828.024.788.957	21.019.000.000	11.460.525.000			400.887.457.292		<b>0,48</b>
_KotaBogor-201	316.217.194.875	892.199.445.365	9.756.700.000	49.448.383.700		2.999.965.000	513.777.201.790		<b>0,35</b>
_KotaBogor-201	355.282.237.890	1.141.638.163.971	8.524.950.000	158.204.655.240		10.499.965.000	609.126.355.841		<b>0,31</b>
_KotaBogor-201	505.077.030.315	1.356.529.980.355	4.570.515.000	125.745.495.000			721.136.940.040		<b>0,37</b>
_KotaBogor-201	645.148.569.459	1.574.372.008.958	19.667.663.000	154.905.086.000			754.650.690.499		<b>0,41</b>
_KotaSukabumi	177.368.123.797	506.568.226.729	40.089.000.000	5.664.150.000	1.655.872.000		281.791.080.932		<b>0,35</b>
_KotaSukabumi	161.781.324.263	565.149.868.771	23.090.700.000	27.775.800.000			352.502.044.508		<b>0,29</b>
_KotaSukabumi	177.384.112.676	631.323.058.313	19.644.400.000	61.642.175.120		7.713.120.000	364.939.250.517		<b>0,28</b>

_KotaSukabumi-	251.493.826.902	732.513.653.312	18.138.860.000	55.214.998.000		1.101.717.000	406.564.251.410		0,34
_KotaSukabumi-	292.873.911.640	844.635.562.884	25.048.763.000	74.449.501.000		371.388.200	451.891.999.044		0,35
_KotaBandung-2	1.140.331.297.282	2.402.466.979.725	45.609.771.000			37.511.925.000	1.178.899.694.036	114.292.407	0,47
_KotaBandung-2	943.902.817.466	2.440.160.360.714	51.515.510.000			115.079.253.600	1.329.586.834.892	75.944.756	0,39
_KotaBandung-2	1.177.882.610.569	3.115.296.523.905	44.307.900.000	364.397.875.479		7.500.000.000	1.521.208.137.857		0,38
_KotaBandung-2	1.591.262.794.370	3.666.693.409.600	37.047.460.000	293.695.361.000			1.744.687.794.230		0,43
_KotaBandung-2	1.886.262.389.043	4.332.088.946.776	67.312.530.000	425.123.281.000			1.953.390.746.733		0,44
_KotaCirebon-20	274.968.997.021	637.259.937.077	33.873.000.000				328.417.940.056		0,43
_KotaCirebon-20	240.125.342.328	677.729.110.504	19.634.900.000		25.292.700.000		392.676.168.176		0,35
_KotaCirebon-20	357.726.237.675	838.617.783.414	4.670.700.000	35.618.820.500			440.602.025.239		0,43
_KotaCirebon-20	363.830.178.307	872.125.300.174	20.172.180.000				488.122.941.867		0,42
_KotaCirebon-20	358.404.971.737	1.009.950.399.239	28.845.610.000	88.285.217.000			534.414.600.502		0,35
_KotaBekasi-200	624.772.739.245	1.480.482.397.876	15.128.000.000	16.876.707.000			823.704.951.631		0,42
_KotaBekasi-201	509.403.058.428	1.582.441.084.727	11.175.825.000	70.923.648.000			990.938.553.299		0,32
_KotaBekasi-201	900.520.559.634	2.220.351.556.783	39.095.925.000	277.188.149.720			1.003.546.922.429		0,41
_KotaBekasi-201	1.347.219.427.116	2.678.890.729.809	24.730.838.000	174.552.873.000		3.192.073.260	1.129.195.518.433		0,50
_KotaBekasi-201	1.314.289.337.871	2.962.609.186.288	18.669.315.999	213.125.791.500		1.952.000.000	1.414.572.740.918		0,44
_KotaDepok-200	548.315.102.035	991.862.300.691	19.293.000.000	12.718.200.000			411.535.998.656		0,55
_KotaDepok-201	511.730.408.960	1.111.708.060.137	35.765.900.000	59.160.672.000		2.999.965.000	502.051.114.177		0,46
_KotaDepok-201	540.569.461.966	1.329.137.909.465	14.235.000.000	168.948.452.400			605.384.995.099		0,41
_KotaDepok-201	769.830.598.344	1.634.893.022.148	52.061.510.000	109.629.910.000			703.371.003.804		0,47
_KotaDepok-201	977.634.189.026	1.921.402.778.745	13.495.607.000	143.850.136.000			786.422.846.720		0,51
_KotaCimahi-20	245.067.515.007	592.055.088.602	31.746.000.000	8.616.150.000			305.848.080.210	777.343.385	0,41
_KotaCimahi-20	204.618.341.028	619.489.083.478	27.297.200.000	35.642.257.600			350.649.907.025	1.281.377.825	0,33
_KotaCimahi-20	296.718.304.871	721.746.717.932	1.967.400.000				423.061.013.061		0,41
_KotaCimahi-20	272.685.774.957	872.552.563.936	26.916.070.000	81.110.429.000			491.840.289.979		0,31
_KotaCimahi-20	281.524.153.021	975.350.197.043	25.643.550.000	114.336.010.000			553.846.484.022		0,29
_KotaTasikmala	240.546.479.952	709.021.729.993	40.445.000.000	19.717.409.300			408.308.070.543	4.770.198	0,34
_KotaTasikmala	173.102.923.101	829.347.403.379	28.793.200.000	99.253.478.694			528.193.278.663	4.522.921	0,21
_KotaTasikmala	174.138.593.072	915.696.936.770	34.504.300.000	133.585.128.320			573.467.169.749	1.745.629	0,19
_KotaTasikmala	228.500.332.322	1.061.433.837.805	30.936.990.000	122.975.025.000			679.021.490.483		0,22
_KotaTasikmala	398.750.406.548	1.365.593.492.674	36.374.200.000	167.912.854.000			762.556.032.126		0,29



## LAMPIRAN 5

CONTOH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TA 2009

No (1)	Uraian (2)	Catatan (3)	Tahun Anggaran 2009			Realisasi 2008 (7)
			Anggaran (4)	Realisasi (5)	% (6)	
	<b>Pendapatan</b>		<b>1.977.151.994.000</b>	<b>2.178.137.511.638</b>	<b>110.17%</b>	<b>1.875.856.412.530</b>
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>321.074.025.000</b>	<b>337.903.884.329</b>	<b>105.24%</b>	<b>316.635.690.464</b>
	Pajak Daerah	4.b.1)	159.914.948.000	167.079.071.810	104.48%	159.731.425.185
	Retribusi Daerah	4.b.2)	109.965.372.000	116.502.385.407	105.94%	117.093.957.647
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.b.3)	16.202.324.000	16.230.267.061	100.17%	13.810.402.411
	Lain-Lain PAD Yang Sah	4.b.4)	34.991.381.000	38.092.160.051	108.86%	25.999.905.221
	<b>Transfer Dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>		<b>1.395.963.550.000</b>	<b>1.524.291.997.485</b>	<b>109.19%</b>	<b>1.336.366.431.200</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak	4.b.5)	209.453.539.000	243.313.357.834	116.17%	248.599.417.088
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	4.b.6)	13.061.449.000	107.530.077.651	823.26%	14.888.456.112
	Dana Alokasi Umum	4.b.7)	1.111.979.562.000	1.111.979.562.000	100.00%	1.062.589.558.000
	Dana Alokasi Khusus	4.b.8)	61.469.000.000	61.469.000.000	100.00%	10.289.000.000
	<b>Transfer Dari Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>31.071.653.000</b>	<b>-</b>	<b>8.044.646.733</b>
	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau		0	0	-	113.733.480
	Dana Perimbangan Lainnya		0	0	-	7.930.913.253
	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	4.b.9)	0	29.061.825.000	-	0
	Dana Penganggulangan Bencana	4.b.10)	0	2.009.828.000	-	0
	<b>Transfer Dari Pemerintah Provinsi</b>		<b>170.306.987.000</b>	<b>166.965.418.392</b>	<b>98.04%</b>	<b>138.682.160.963</b>
	Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.b.11)	169.411.781.000	165.469.366.353	97.67%	138.520.799.872
	Bagi Hasil Retribusi Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.b.12)	81.050.000	122.569.440	151.23%	161.361.091
	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	4.b.13)	814.156.000	1.373.482.599	168.70%	0
	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>		<b>89.807.432.000</b>	<b>117.904.558.432</b>	<b>131.29%</b>	<b>76.127.483.170</b>
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.b.14)	89.807.432.000	117.904.558.432	131.29%	71.127.518.170
	Bantuan Keuangan dari Provinsi DKI Jakarta		0	0	-	4.999.965.000
	<b>Belanja</b>		<b>2.380.595.223.000</b>	<b>2.179.663.902.055</b>	<b>91.56%</b>	<b>1.758.774.923.665</b>
	<b>Belanja Operasi</b>		<b>1.781.796.791.000</b>	<b>1.643.199.876.314</b>	<b>92.22%</b>	<b>1.352.672.529.118</b>
	Belanja Pegawai	4.b.15)	1.097.546.442.000	1.017.602.376.260	92.72%	889.902.685.112
	Belanja Barang	4.b.16)	395.843.869.000	359.865.841.880	90.91%	255.033.012.995
	Belanja Hibah	4.b.17)	57.630.504.000	56.961.900.441	98.84%	104.098.534.216
	Belanja Bantuan Sosial	4.b.18)	133.955.362.000	114.535.918.971	85.50%	49.224.322.300
	Belanja Bantuan Keuangan	4.b.19)	96.820.614.000	94.233.838.762	97.33%	54.413.974.495

No	Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2009			Realisasi 2008
			Anoosaran	Realisasi	%	
	<b>Belanja Modal</b>		<b>562.854.514.000</b>	<b>510.324.974.669</b>	<b>90.67%</b>	<b>366.015.601.566</b>
	Belanja Tanah	4.b.20)	66.159.301.500	49.174.145.485	74.33%	12.333.459.100
	Belanja Peralatan dan Mesin	4.b.21)	73.133.168.000	71.568.671.838	97.86%	40.008.362.526
	Belanja Gedung dan Bangunan	4.b.22)	226.955.015.000	209.723.759.370	92.41%	89.932.743.027
	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	4.b.23)	194.794.997.000	178.094.788.251	91.43%	221.516.336.450
	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.b.24)	1.812.032.500	1.763.609.725	97.33%	2.224.700.463
	<b>Belanja Tak Terduga</b>	4.b.25)	<b>10.400.140.000</b>	<b>675.000.000</b>	<b>6.49%</b>	<b>6.195.630.020</b>
	<b>Bagi Hasil Pendapatan ke Desa</b>		<b>25.543.778.000</b>	<b>25.464.051.072</b>	<b>99.69%</b>	<b>33.891.162.961</b>
	Bagi Hasil Pajak	4.b.26)	19.699.045.000	19.653.555.250	99.77%	15.411.457.676
	Bagi Hasil Retribusi	4.b.26)	5.844.733.000	5.810.495.822	99.41%	3.983.876.000
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pusat		0	0	-	14.495.829.285
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>		<b>(403.443.229.000)</b>	<b>(1.526.390.417)</b>	<b>0.38%</b>	<b>117.081.488.865</b>
	<b>Pembiayaan</b>		<b>403.443.229.000</b>	<b>403.735.345.082</b>	<b>100.07%</b>	<b>315.225.201.084</b>
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>432.306.689.000</b>	<b>432.323.989.949</b>	<b>100.00%</b>	<b>335.291.725.407</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu		432.306.689.000	432.306.689.949	100.00%	320.210.405.407
	Pencairan Dana Cadangan		0	0	-	15.000.000.000
	Penerimaan Piutang Daerah	4.b.27)	0	17.300.000	-	81.320.000
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>28.863.460.000</b>	<b>28.588.644.867</b>	<b>99.05%</b>	<b>20.066.524.323</b>
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.b.28)	26.269.768.000	26.269.768.000	100.00%	17.250.000.000
	Pembayaran Pokok Utang	4.b.29)	2.593.692.000	2.318.876.867	89.40%	2.816.524.323
	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</b>		<b>0</b>	<b>402.208.954.665</b>		<b>432.306.689.949</b>

## RIWAYAT HIDUP



**Ahmad Kamil**, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Lahir dari pasangan bernama Tabroni dan iub bernama Alm Suhana. Lahair di Jakarta 12 Agustus 1993 dan bertemoat tinggal di Kebagusan Wates RT 10 RW 05 Jagakarsa Jakarta Selatan. Pendidikan formal penulis dimulaid ari SDN Jagakarsa 13 pagi tahun 1999-2005. Kemudian dilanjutkan dengan SMP 175 Jakarta dan SMA Negeri 38 Jakarta. Setelah lulus SMA ia menempuh pendidikan di program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri Jakarta pada tahun 2011. Selama di UNJ ia pernah aktif sebagai di organisasi penalaran Lembaga Kajian Mahasiswa. Ia pada tahun 2016 lulus dengan menyelesaikan skripsinya mengenai pengelolaan keuangan daerah.